



**PERANAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
DAN KESENJANGAN PENDAPATAN ANTAR
WILAYAH DI SATUAN WILAYAH
PEMBANGUNAN IV JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Asal :	Hadiah	Klass 338.9 SUB P
	Perwakilan	
Terima di :		
No induk :		
Oleh :	Pengkatalog :	

AKHMAD SUBIYANTO
NIM. 990810101312

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2005**

JUDUL SKRIPSI

PERANAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN KESENJANGAN
PENDAPATAN ANTAR WILAYAH DI SATUAN WILAYAH
PEMBANGUNAN IV JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : AKHMAD SUBIYANTO

N. I. M. : 990810101312

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

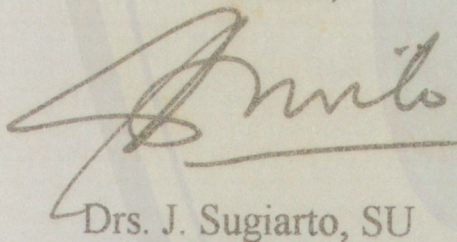
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

31 MARET 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

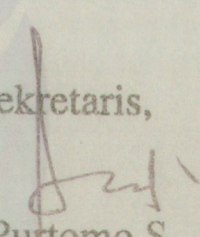
Ketua,



Drs. J. Sugiarto, SU

NIP. 130 610 494

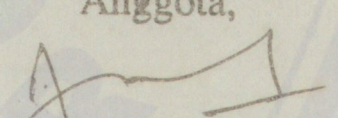
Sekretaris,



Dr. Rafael Purtono S., M.Si

NIP. 131 793 384

Anggota,



Teguh Hadi P., SE, M.Si

NIP. 132 092 300

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi

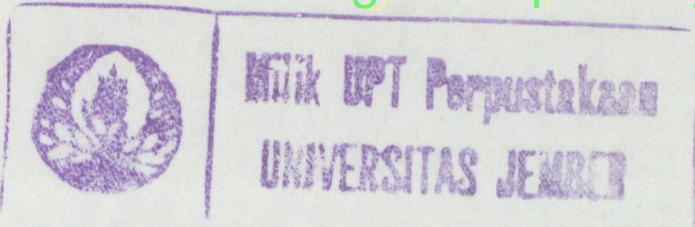
Dekan,



Dr. H. Sarwedi, MM

NIP. 131 276 658





TANDA PERSETUJUAN

Judul : Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Kesenjangan
Pendapatan Antar Wilayah di Satuan Wilayah
Pembangunan IV Jember

Nama : Akhmad Subiyanto

Nim : 990810101312

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Drs. Bambang Yudhono".

Drs. Bambang Yudhono, MM

NIP. 130 355 409

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Teguh Hadi P.".

Teguh Hadi. P, SE, M.Si

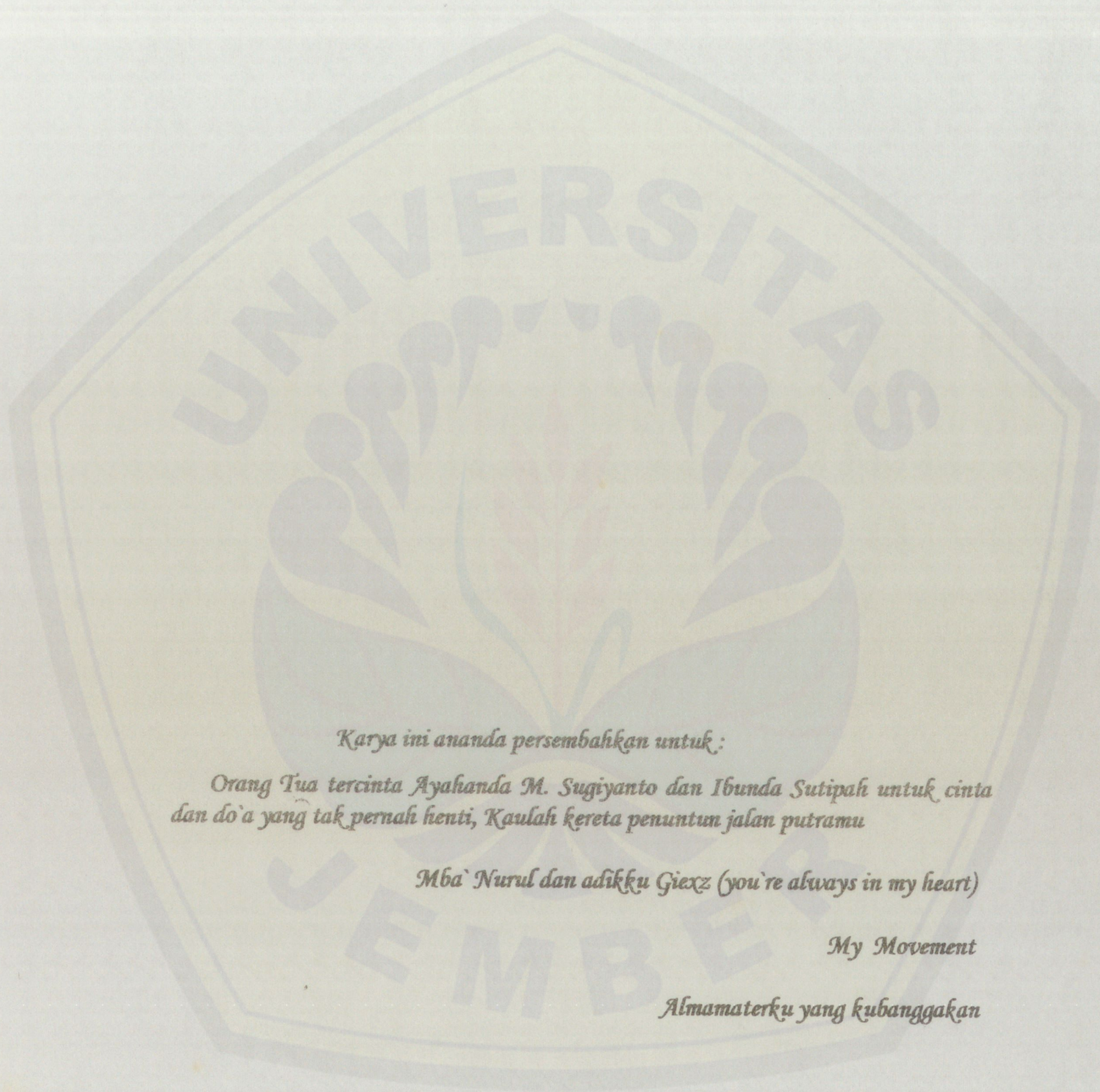
NIP. 132 092 300

Ketua Jurusan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Drs. J. Sugiarto".

Drs. J. Sugiarto, SU

NIP. 130 610 494



Karya ini ananda persembahkan untuk:

Orang Tua tercinta Ayahanda M. Sugiyanto dan Ibunda Sutipah untuk cinta dan do'a yang tak pernah henti, Kaulah kereta penuntun jalan putramu

Mba' Nurul dan adikku Giexz (you're always in my heart)

My Movement

Almamaterku yang kubanggakan

MOTTO

Life for Movement

Movement for Life

(Akhmad Subiyanto)

Shine On, Shine On

Let's Make Harmony

For The Better Futture

(Danni Ahmad dan Toriyaki Gami)

Setiap Pijakan Kakimu dan Cengkeraman Tanganmu

Adalah Usaha

Yakinlah Dengan Kemampuanmu

Kamu Pasti Bisa

(Akhmad Subiyanto)

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “ Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Kesenjangan Pendapatan Antar Wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan IV Jember “ . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pusat-pusat pertumbuhan terhadap daerah belakang dan kesenjangan pendapatan antar wilayah di SWP IV Jember tahun 1997-2003.

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena dengan indikator-indikator pendukung fenomena, tanpa mencari ada tidaknya pola hubungan antara indikator atau variabel pendukung indikator tersebut. Sedangkan komparatif adalah berusaha membandingkan dengan menggambarkan fenomena-fenomena dengan indikator-indikator pendukung fenomena di tiga wilayah SWP IV Jember tanpa mencoba mencari ada tidaknya pola hubungan antara indikator atau variabel pendukung variabel.

Metode analisis menggunakan indeks gravitasi untuk mengetahui tingkat interaksi ruang antar wilayah di SWP IV Jember dengan menggunakan variabel jarak dan jumlah penduduk di masing-masing wilayah didapatkan hasil bahwa interaksi ruang tertinggi adalah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso sepanjang tahun 1997-2003 sebesar 4.03224-4.04321 dengan jarak sejauh 32 Km². Sedangkan hasil indeks gravitasi terendah dihasilkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo sepanjang tahun 1997-2003 sebesar 3.30790-3.32019 dengan jarak sejauh 67 Km². Analisis shift share untuk mengetahui tingkat pergeseran total pertumbuhan ekonomi di SWP IV Jember antara tahun 1997-2003, menghasilkan bahwa Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhan merupakan daerah yang pertumbuhannya paling maju dengan nilai sebesar 101435292.10. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang pertumbuhannya paling lamban dengan nilai sebesar -92360713.95. Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang pertumbuhannya cukup maju dengan nilai sebesar 48749993.89. Indeks Williamson untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah di SWP IV Jember adalah sebesar 0.12-0.61. berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah di SWP IV Jember selama tahun 1997-2003 relatif masih cukup tinggi.

Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah perlu mempertimbangkan konsep perencanaan pembangunan regionalnya dengan melihat potensi sumberdaya dan kemampuan masing-masing daerah serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah di SWP IV Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan judul “ **PERANAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN IV JEMBER** ”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terrealisasi dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantun dari semua pihak, baik bantuan moral ataupun material. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. H. Sarwedi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Bapak Drs. J. Sugiarto, SU selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Bapak Drs. Bambang Yudhono, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan nasehat, masukan dan petunjuk kepada penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini
4. Bapak Teguh Hadi, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat, masukan dan petunjuk kepada penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu tercinta, atas kesabaran dan keikhlasannya dalam berdo'a, sekedar ingin melihat anaknya menjadi seorang sarjana
6. Kakakku Nurul Ayni dan adikku Akhmad Sugiono terima kasih atas kasih sayangnya selama ini
7. Sahabat- sahabat PMII se Cabang Jember dan Jawa Timur, terima kasih atas pergulatan ide dan pemikirannya maupun aksi selama penulis menjadi mahasiswa.



8. Sahabat-sahabat pergerakanku Zulfikris Shofi, Abdurrachman, Aay, Jazzuli, Aris.S, Atik N, Helmik S, Nunung, Dwi Wahyu Utami, Indah. Su, Rahardian,(Bravo Pro 99), Herdian Prabowo (trimakasih atas petuah-petuahannya), Bos Edi (sang pujangga), Ibnu (ayo semangat lagi), Halim Feng, Imam. S (makasih tumpangannya) dan Tri, Asep siong (always Jazz), Arif.R (kapan mengakhiri petualanganmu), Tri Budi, Doel dan Deasy (bravo Juve), Haryadi, Karim, Khayan dan Anita, Siro, Indung, Susilo, Hendrik. F, Maprut (ngejoss terus yo), P'Nok dan A'an, Nizam, Yuyun Ndut, IIS cantik (smoga makin cantik), Adik-adik H-19 (Eriska, Tanti, Leswati, Wulan, Chepi "Pipit", Anis, Lelly, Anel, Siska ctk, Eni, Puji, dan lain-lainnya), indahnya persahabatan dan proses yang kita lalui bersama.
9. Sahabat-sahabat Pengurus Rayon PMII Ekonomi 2004-2005 dan Pengurus Cabang PMII Jember, Tangan Terkepal dan Maju ke Muka.
10. Komunitas Forum Warkop Prosalina, tempat kita berproses bersama dan mencurahkan kepenatan.
11. Teman-teman IESP' 99, terima kasih atas kebersamaannya.
12. Teman-teman Inaugurasi'99, kesuksesan itu awalnya dari kebersamaan.
13. Kawan-kawan Intra Kampus, BEM, DPM, MPM, Mahapena, Ecpose, Kurusetra, Mahapala, dan lain-lain terima kasih atas prosesnya di dalam kampus selama ini.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah di berikan dan semoga ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamithorieq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jember, 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	8
2.2.2 Teori Pusat Pertumbuhan	9
2.2.3 Konsep Ruang dan Wilayah.....	11
2.2.4 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah	12
2.2.5 Kesenjangan Antar Wilayah	14
2.2.6 Konsep Analisis Indeks Gravitasi	15
2.2.7 Konsep Analisis Shift Share.....	16
2.2.8 Konsep Analisis Indeks Williamson	18

III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Rancangan Penelitian	20
3.1.1 Jenis Penelitian.....	20
3.1.2 Unit Penelitian.....	20
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	20
3.1.4 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.2 Metode Analisis Data.....	21
3.2.1 Analisis Indeks Gravitasi	21
3.2.2 Analisis Shift Share.....	21
3.2.3 Analisis Indeks Williamson	22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	23
4.1.1 Keadaan Geografis	23
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	24
4.1.3 Keadaan Perekonomian.....	24
4.1.4 Kebijakan Pembangunan di SWP IV Jember.....	29
4.2 Analisis Data	30
4.2.1 Hasil Analisis Indeks Gravitasi di SWP IV Jember tahun 1997-2003.....	30
4.2.2 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah di SWP IV Jember.....	32
4.2.3 Tingkat Kesenjangan Antar Wilayah di SWP IV Jember tahun 1997-2003.....	33
4.3 Pembahasan	34
V. KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk SWP IV Jember Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun, 2002-2003	25
2. Struktur Perekonomian SWP IV Jember , 1997-2003	26
3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral SWP IV Jember, 1997-2003	28
4. Produk Domestik Regional Bruto SWP IV Jember, 1997-2003	29
5. Pendapatan Perkapita SWP IV Jember, 1997-2003	30
6. Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi di SWP IV Jember dengan Menggunakan Variabel Pilih Jumlah Penduduk dan Jarak, 1997-2003	32
7. Hasil Perhitungan Pergeseran Total Pertumbuhan Ekonomi di SWP IV Jember, 1997-2003	33
8. Hasil Perhitungan Indeks Willamson di SWP IV Jember, 1997-2003	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jumlah Penduduk di SWP IV Jember Tahun 1997-2003
- Lampiran 2. Jarak Atar Wilayah di Jawa Timur
- Lampiran 3. Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi, 1997-2003
- Lampiran 4. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Jember, 1997ADHK 1993
- Lampiran 5. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso, 1997 ADHK 1993
- Lampiran 6. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Situbondo, 1997 ADHK 1993
- Lampiran 7. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Jember, 2003 ADHK 1993
- Lampiran 8. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Jember, 2003 ADHK 1993
- Lampiran 9. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Jember, 2003 ADHK 1993
- Lampiran 10. Peranan Sektoral (PDRB) SWP IV Jember, 1997 ADHK 1993
- Lampiran 11. Peranan Sektoral (PDRB) SWP IV Jember, 2003 ADHK 1993
- Lampiran 12. Peranan Sektoral (PDRB) SWP IV Jember 1997 dan 2003 ADHK 1993
- Lampiran 13. Perhitunagn Nilai ri, Ra, Ri
- Lampiran 14. Perhitungan Nilai rp, rs, rt
- Lampiran 15. Perhitungan Nilai PNij, PPij, PPWij
- Lampiran 16. Hasil Perhitungan Nilai Komponen Pertumbuhan Nasional
- Lampiran 17. Hasil Perhitungan Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional
- Lampiran 18. Hasil Perhitungan Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah
- Lampiran 19. Hasil Perhitungan Nilai Pergeseran Total (PTij)
- Lampiran 20. Hasil Perhitungan Nilai PNij, PPij, PPWij, PTij
- Lampiran 21. Hasil Perhitungan Nilai Indeks Wlliamson, 1997

Lampiran 22. Hasil Perhitungan Nilai Indeks Wlliamson, 1998

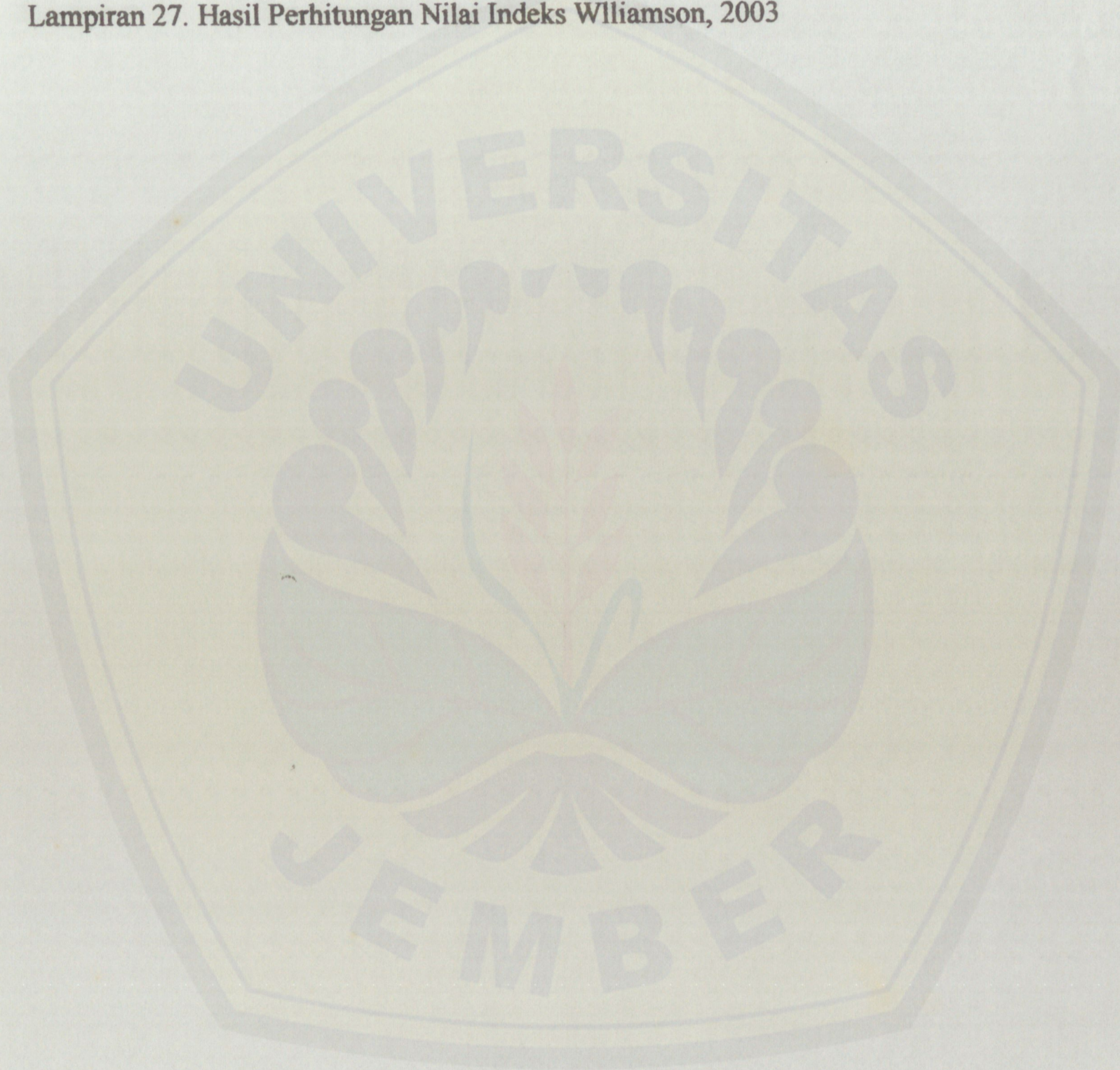
Lampiran 23. Hasil Perhitungan Nilai Indeks Wlliamson, 1999

Lampiran 24. Hasil Perhitungan Nilai Indeks Wlliamson, 2000

Lampiran 25. Hasil Perhitungan Nilai Indeks Wlliamson, 2001

Lampiran 26. Hasil Perhitungan Nilai Indeks Wlliamson, 2002

Lampiran 27. Hasil Perhitungan Nilai Indeks Wlliamson, 2003



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar wilayah dengan perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Dalam GBHN RI tahun 1993 dinyatakan bahwa agar pembangunan nasional di Indonesia dapat berjalan bersama, perlu adanya perpaduan yang serasi antara pembangunan sektoral dan regional (Aziz, 1994 : 230).

Pembangunan nasional Indonesia pada masa pemerintahan orde baru diselenggarakan dengan menggunakan konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Dalam konsep tersebut pembangunan bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama kurun waktu dua puluh lima tahun lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata diatas 6 (enam) persen telah banyak mengubah wajah perekonomian Indonesia. Akan tetapi, tanpa mengesalkan arti pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan orde baru, harus disadari pula bahwa pembangunan di Indonesia lebih tertinggal dari negara-negara lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut ternyata belum memiliki basis yang kuat. Sehingga seringkali perekonomian Indonesia mengalami goncangan karena gejolak eksternal. Disamping itu, konsep pembangunan dengan pertumbuhan yang tinggi ternyata tidak diikuti dengan pemerataan. sehingga yang terjadi adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi (social and economic injustice) yang mengakibatkan kesenjangan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut didasarkan pada konsep *tickle down effect*, artinya dengan pertumbuhan yang tinggi diharapkan terjadi tetesan kebawah sehingga kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemilihan sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

kebijaksanaan tersebut biasanya disebut dengan kebijaksanaan sektoral (Glasson, 1991). Pembangunan yang diterapkan pada setiap repelita memperlihatkan perkembangan pembangunan pada setiap daerah sangat bervariasi. Hal ini mendorong terjadinya kesenjangan antar wilayah. Berdasarkan pada konsep *trickle down effect* pembangunan hanya bertumpu pada daerah yang memiliki keunggulan komparatif yang tinggi, sedangkan daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif kurang dapat meningkatkan pembangunannya. Sementara tetesan kebawah yang diharapkan tidak kunjung tiba, justru memperbesar adanya kesenjangan.

Pembangunan yang dicapai Indonesia selama ini telah menghasilkan daerah maju dan daerah yang pembangunannya lamban. walaupun daerah yang bersangkutan telah berupaya untuk menerapkan kebijakan pembangunan wilayahnya agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah serta antar sektor terutama sektor ekonomi. Secara umum yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan adalah perbedaan dalam struktur industri dan struktur ekonomi (Budiharsono, 1991 : 68).

Kesenjangan antar wilayah dalam perekonomian regional maupun nasional merupakan suatu fenomena. Hal semacam ini dapat terjadi pada semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Suatu hal yang wajar apabila dalam suatu negara terdapat daerah –daerah yang pertumbuhannya lamban dan terbelakang di bandingkan dengan daerah yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tersebut antara lain : struktur ekonomi, aglomerasi, perbedaan infrastruktur, heterogenitas, dan beragam karakteristik suatu wilayah, serta kurangnya keterkaitan antar wilayah.

Berdasarkan alasan inilah strategi pembangunan daerah didasarkan pada konsep regionalisasi wilayah yaitu upaya pengelompokan wilayah secara fungsional ke dalam wilayah-wilayah pembangunan besar dan kecil, berdasarkan keadaan topografi dan cuaca serta tingkat kesuburan tanah (Tjokrowinoto, 1996 : 124). Implementasi dari konsep ini adalah pengelompokan propinsi-propinsi kedalam wilayah-wilayah pembangunan, sementara itu di dalam provinsi sendiri

yang terdiri dari kabupaten dan kotamadya dikelompokkan kedalam sub-provinsial region atau secara umum disebut Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

SWP dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah, memperkuat kesatuan ekonomi nasional dan mencapai pertumbuhan yang efisien. Kesemuanya itu di tujukan untuk menuju pemerataan pembangunandaerah dan mencapai sasaran pembangunan daerah yang lebih terarah dan terkoordinasi serta merupakan strategi pembangunan regional yang di perlukan dalam melengkapi stategi pembangunan sektoral. SWP mengelompokkan beberapa daerah kedalam satuan-satuan wilayah pwmbangunan berdasarkan pada mekanisme pengembangan wilayah yang bertumpu pada sistem daerah nodal atau simpul-simpul daerah yang tercipta melalui daerah-daerah tersebut dalam mendistribusikan sumberdayanya.

Konsep regionalisasi di Indonesia dilaksanakan pada Pelita II dengan membagi Indonesia menjadi empat Wilayah Pembangunan Utama (WPU) dan 10 Wilayah Pengembangan (WP). Pengelompokan WPU (Budiharsono, 1991 : 43) didasarkan atas penggabungan antara konsep homogeneous region, nodal region dan administrative region. Penerapan ketiga konsep ini untuk memudahkan membagi region atau wilayah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perumusan dan implementasi perencanaan pembangunan. Pada Pelita III, pengelompokan wilayah pembangunan berubah menjadi lima WPU dengan alasan untuk lebih memantapkan konsep regionalisasi. Konsep ini secara umum bertujuan untuk memperlihatkan kepada perencanaan pembangunan bahwa wilayah perencanaan tidak harus mengikuti pembagian wilayah secara administrative saja. Akan tetapi, lebih menitik beratkan pada perwilayahan. Pada Pelita IV, pengelompokan wilayah pembangunan berubah kembali menjadi enam WPU dan 38 WP. Perubahan ini bertujuan agar penentuan kebijaksanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah dapat lebih terarah, tepat dan sesuai dengan potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing wilayah serta memudahkan penerapan konsep region dalam perumusan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan (Tjokrowinoto, 1996 : 125).

Pengelompokan wilayah pembangunan di tingkat propinsi dalam bentuk Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Perencanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat I Jawa Timur. Jawa Timur termasuk dalam WPU D bersama Bali, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan dan Surabaya sebagai pusat pengembangan. Perencanaan pengembangan wilayahnya meliputi sembilan SWP, yaitu : SWP I Gerbangkertasusila, SWP II Madura, SWP III Banyuwangi, SWP IV Jember dan sekitarnya (DS), SWP V Probolinggo (DS), SWP VI Malang (DS), SWP VII Kediri (DS), SWP VIII Madiun (DS) dan SWP IX Tuban (DS).

Fenomena konsep regionalisasi dengan menekankan pada pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia tampak pada wilayah DKI dengan JABOTABEK-nya dan Surabaya dengan GERBANGKERTASUSILA-nya. Dua wilayah tersebut dapat dikatakan telah berhasil menerapkan konsep regionalisasi di Indonesia.

Surabaya merupakan pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah di Propinsi Jawa Timur, khususnya bagi daerah di sekitarnya yaitu Gresik, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo dan Bangkalan. Keberhasilan Surabaya dalam memberikan peranannya terhadap pengembangan wilayah didaerah belakangnya tersebut diharapkan dapat diikuti pula oleh pusat-pusat pertumbuhan lainnya di seluruh Satuan wilayah Pembangunan yang ada di Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 tahun. 1996 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi Jawa Timur tahun 1997/1998-2011/2012, Bab. V tentang Pokok-pokok Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi Jawa Timur, Bagian 10 pasal 38 (1) berisi tentang struktur SWP Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember dan sekitarnya termasuk dalam SWP IV dengan Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhannya., Kabupaten Jember dan sekitarnya termasuk dalam SWP IV dengan Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhannya. Sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Jember memiliki mobiltas laju penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, komunikasi serta transportasi yang lebih baik dibandingkan kabpaten lainnya di SWP IV Jember. Pembentukan SWP mempunyai harapan bahwa kegiatan pembangunan yang

terpusat di Kabupaten Jember dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan daerah belakangnya yang pada akhirnya akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan dalam ruang ekonomi di daerah belakang.

Kabupaten Jember dan hinterlandnya yaitu SWP Kabupaten Bondowoso dan SWP Kabupaten Situbondo. SWP IV Jember dan sekitarnya memiliki luas secara keseluruhan 6.492 Km². Kabupaten Jember memiliki wilayah terluas sebesar 3.293,40 Km², Kabupaten Bondowoso sebesar 1.560,10 Km², Kabupaten Situbondo sebesar 1.638,50 Km². Karakteristi kabupaten di SWP IV Jember adalah sama, masih didominasi oleh sektor pertanian dan secara cultural masih didominasi oleh suku Madura dan sedikit dari suku Jawa. Secara geografis SWP IV Jember dan sekitarnya memiliki batas yaitu disebelah utara selat Madura, sebelah barat Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan Samudera Hindia dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Secara Topografi wilayah di SWP IV Jember terdiri dari barisan pegunungan, hal inilah yang menyebabkan daerah ini menjadi subur dan potensial untuk sektor pertanian.

Keberhasilan pembangunan di SWP IV Jember dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga konstan (1993) Jawa Timur sebesar 3.728.269.602 dari total PDRB Jawa Timur sebesar 58.758.257,64 pada tahun 2001.

Dilihat dari struktur perekonomiannya SWP IV Jember dalam pengembangannya masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusinya sebesar 36,80%; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,42%; sektor jasa-jasa sebesar 17,23%; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,30%; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 6,795; sektor industri pengolahan sebesar 4,53%; sektor kontruksi sebesar 3,85%; sektor pertambangan dan galian sebesar 1,11% dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,97%.

Pertumbuhan ekonomi di SWP IV Jember pada tahun 1997 tumbuh sebesar 2,53%, pada saat krisis sebesar -10,02%, pada saat setelah krisis tahun 1999 tumbuh sebesar 1,43%, pada tahun 2000 tumbuh sebesar 2,77% dan pada tahun 2001 sebesar 4,64%. Pertumbuhan PDRD di SWP IV Jember dan sekitarnya

berdasarkan pembagian wilayah adalah Kabupaten Jember sebesar 3,37% tahun 2001 Atas dasar harga konstan 1993. kabupaten Bondowoso sebesar 1,33% tahun 2001 atas dasar harga konstan tahun 1993. kabupaten Situbondo sebesar 1,11% tahun 2001 atas dasar harga konstan tahun 1993.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam analisis ini adalah bagaimanakah peranan dan kontribusi pertumbuhan ekonomi antar satuan wilayah pembangunan di SWP IV Jember dan sekitarnya serta seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan antar satu wilayah pembangunan di SWP IV Jember dan sekitarnya.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah belakangnya (hinterland).
2. Kontribusi pertumbuhan ekonomi antar SWP di SWP IV Jember dan sekitarnya.
3. Kesenjangan pendapatan antar SWP di SWP IV Jember dan sekitarnya.

1.3.2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi-instansi yang terkait dalam kebijaksanaan pembangunan.
2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang sama sudah pernah dilakukan oleh Robiatin (2000) tentang “Implementasi Pembangunan Daerah Tingkat II Dalam Kaitan Pengembangan Perwilayahan Pembangunan di SWP VIII Madiun Tahun 1993-1996”. Alat analisis yang digunakan adalah uji kausalitas Grenger untuk melihat pergeseran tingkat kesenjangan ekonomi, Indeks Williamson untuk melihat tingkat kesenjangan pendapatan. Hasil analisis yang diperoleh adalah selama kurun waktu 1993-1996 hasil perhitungan pergeseran total adalah sebagai berikut : Kabupaten Madiun sebesar 40,44% (daerah maju), Kabupaten Ngawi -7,63% (lamban), Kabupaten Ponorogo -9,985 (lamban), Kabupaten Magetan -13,87% (lamban) dan Kabupaten Pacitan -20,26% (lamban). Rata-rata tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah di SWP VIII Madiun adalah sebesar 0,63417. hal ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat kesenjangan yang cukup besar.

Penelitian Diah Kumalasari (2002) yang berjudul “Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Kesenjangan Pendapatan Antar Wilayah Dalam Kaitan Pengembangan Perwilayahan di Satuan Wilayah Pembangunan VII Kediri”. Alat analisis yang dipakai adalah regresi linear sederhana untuk mengetahui laju pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan, analisis shift share untuk mengetahui pergeseran kontribusi pertumbuhan ekonomi dan analisis indeks Williamson untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan.

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat laju pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan terhadap daerah belakang (hinterland). Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan regresi linear sederhana yang menunjukkan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Sedangkan tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat dilihat dari hasil analisis indeks Williamson yang menunjukkan nilai sebesar 0,021 sampai 0,398. dengan demikian dapat dilihat bahwa kesenjangan di SWP VII Kediri relatif kecil.

Penelitian ini mengacu pada penelitian di atas. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada daerah penelitian yaitu di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV Jember. Sedangkan data diambil secara time series mulai tahun 1997-2001, analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Gravitasi, analisis shift share dan indeks Williamson.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya ada pada tiga aspek yaitu : proses, output jangka panjang dan jangka panjang. Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Aspek kedua adalah pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Output perkapita adalah total output dibagi dengan jumlah penduduk. Proses kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan melihat total output di suatu pihak dan jumlah penduduk dipihak lain. Aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi adalah suatu prospektif jangka panjang. Suatu perekonomian akan tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup panjang akan mengalami kenaikan output. Proses pertumbuhan ekonomi haruslah *self generating* yang berarti bahwa proses tersebut menimbulkan kekuatan atau momentum bagi munculnya pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Bodiono, 1985 : 2).

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan pertumbuhan PDRB suatu daerah atau wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas ekonomi menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Suatu perekonomian akan dikatakan mengalami pertumbuhan dan perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan baru dapat dikatakan terjadi jika jumlah barang dan jasa secara

fisisk yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada periode-periode berikutnya.

Pada dasarnya teori-teori yang menegemukakan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat di bedakan menjadi dua yaitu pertama *inward looking theory* yang menganalisa pertumbuhan yang diakibatkan oleh daerah itu sendiri, misalnya *the export base theory* dan *the sector base theory*. Yang kedua adalah *outward oriented theory* yang menekankan pada mekanisme yang mendasari penurunan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu daerah tidak lepas dari pertumbuhan daerah lain. Perbedaan pertumbuhan suatu daerah dengan daerah yang lain akan menyebabkan timbulnya kesenjangan antar wilayah.

2.2.2. Teori Pusat Pertumbuhan

Teori tempat sentral telah melandasi dikembangkannya teori pusat pertumbuhan. Teori ini menekankan dinamisme dan aglomerasi industri-industri yang memungkinkan kebijaksanaan secara simultan, yaitu pemilihan pusat-pusat yang dominan serta mendesentralisasikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam hal ini adalah pemusatan investasi dalam sejumlah sektor kunci pada beberapa tempat tertentu. Dalam memusatkan usaha dalam sejumlah sektor dan tempat kecil diharapkan pembangunan akan menjalar pada sektor-sektor lain pada seluruh wilayah. Dengan demikian sumber-sumber material dan manusiawi yang digunakan dapat dimanfaatkan lebih baik dan efisien (Glassonn 1991 : 157).

Teori pusat pertumbuhan dijabarkan secara induktif dari pengamatan atas perkembangan ekonomi. Dengan mengembangkan suatu tipologi ruang ekonomi, yang terpenting antara lain adalah tipologi ruang ekonomi sebagai suatu ajang kekuatan dari tipologi mana penjabaran konsep suatu pusat sebagai vektor dari kekuatan-kekuatan ekonomi. Sebagai ajang kekuatan-kekuatan ruang ekonomi terdiri dari pusat-pusat dari mana memancar kekuatan-kekuatan sentripetal ditarik (Glasson, 1991 : 172).

Perraoux berpendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai tempat pada waktu yang sama, kemunculannya hanya akan terjadi di berbagai

tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda serta berkembang melalui saluran yang berbeda dengan akibat akhir yang ditimbulkan berbeda pula terhadap keseluruhan perekonomian (Nursyaman, 1996 : 241); Myrdal menekankan analisisnya pada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan di berbagai daerah, yaitu *back wash effect* dan *spread effect*. Suatu daerah yang lebih maju akan berkembang lebih cepat daripada yang kurang maju karena faktor-faktor yang menimbulkan *spread effect* ke daerah yang lebih miskin dan menyebabkan ketidakseimbangan yang makin lama semakin bertambah di berbagai daerah (Nursyaman, 1996 : 243); Hirschman berpendapat bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi pada waktu yang sama di berbagai tempat dan apabila di suatu tempat terjadi pembangunan, terdapat daya tarik yang kuat yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar daerah dimana pembangunan bermula (Nursyaman, 1996 : 243); Boudenvile menampilkan konsep pusat pertumbuhan yang berlokasi dan mengikuti pendapat Perraoux. Boudenvile mendefinisikan konsep pertumbuhan wilayah sebagai seperangkat industri-industri sedang berkembang lebih lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengembangannya (Sukirno, 1979 : 67).

Konsep dasar teori pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai berikut (Glasson, 1991 : 172) :

1. Konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan propulsif, menyatakan pada pusat pertumbuhan terdapat perusahaan propulsif dan besar yang termasuk dalam *leading industries* yang mendominasi unit ekonomi lainnya;
2. Konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan;
3. Konsep *spread effect* menyatakan bahwa pada waktu kualitas propulsif dinamik pada kutub pertumbuhan memancar keluar dan memasuki ruang sekitarnya. *Spread effect* dikenal juga dengan *trickle down effect* sangat menarik bagi perencanaan regional.

2.2.3. Konsep Ruang dan Wilayah

a. Konsep ruang

Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur yaitu : jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Konsep ruang juga berkaitan erat dengan waktu, dikarenakan pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah. Hartchorne mengintroduksikan unsur hubungan fungsional di antara fenomena, yang melahirkan konsep struktur fungsional tata ruang. Struktur fungsional tata ruang bersifat subyektif, karena setiap peneliti dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan criteria subyektif (Budiharsono, 1989 : 30).

b. Konsep Wilayah

Wilayah merupakan suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara interval. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu (Budiharsono, 1989 : 32) :

1. Wilayah Homogen;

Wilayah homogen adalah wilayah yang di pandang dari suatu aspek mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang sama. Sifat-sifat dan cirri-ciri homogen tersebut misalnya dalam hal ekonomi, geografi, agama, suku, dan sebagainya. Richardson (1991) dan Hoover (1977) mengemukakan bahwa wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal (internal uniformity).

2. Wilayah Nodal;

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional memiliki ketergantungan antara pusat dan daerah belakangnya (hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari mobilitas laju penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan tranportasi. Sukirno (1991) menyatakan bahwa pengertian wilayah nodal adalah yang paling ideal dalam analisis ekonomi keruangan, selain itu Sukirno juga mengartikan wilayah itu sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu dan beberapa pusat kegiatan ekonomi.



Hoover (1977) menyatakan bahwa struktur dan wilayah nodal dapat digambarkan sebagai satu sel hidup atau atom, dimana terdapat satu inti dan suatu periferi yang saling melengkapi. Contoh wilayah Surabaya dengan gerbangkertasil, dimana Surabaya sebagai intinya dan gerbangkertasila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan) sebagai daerah belakangnya.

3. Wilayah Administratif;

Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik. Sukirno (1991) mengatakan bahwa didalam implementasinya pengertian ini sering digunakan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Hal tersebut dikarenakan : (a) dalam pelaksanaan kebijakan dan perencanaan pembangunan diperlukan tindakan-tindakan dari badan-badan pemerintah daerah; (b) wilayah yang dibatasi berdasarkan satuan administrasi lebih mudah dalam analisisnya.

4. Wilayah Perencanaan.

Boudeville (Glasson, 1991) mendefinisikan wilayah perencanaan sebagai wilayah yang memperlihatkan kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Klaessen (Glasson, 1991) berpendapat bahwa wilayah perencanaan haruslah : (a) cukup besar untuk mengambil suatu keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi; (b) mampu menyulap industrinya dengan tenaga kerja yang diperlukan; (c) mempunyai struktur eonomi yang homogen; (d) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growt point); (e) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan; (f) mempunyai masyarakat dalam wilayah perencanaannya yang sadar terhadap persoalan-persoalannya. Contoh wilayah perencanaan adalah wilayah di Daerah Aliran Sungai (DAS), dimana wilayah tersebut dari hulu sampai hilir haruslah memiliki perencanaan yang terpadu, karena perlakuan atau suatu tindakan di hulu akan berakibat juga di hilir.

2.2.4. Konsep Dasar Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah regional mendefinisikan suatu wilayah sebagai lingkungan permukaan bumi pada umumnya dan tentu batasnya. Untuk

lebih menyederhanakan pengertian wilayah, maka dibagi antara wilayah nasional dan wilayah daerah regional. Wilayah nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan Negara. Sedang wilayah daerah adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kewenangan pemerintah daerah. Sebagai contoh adalah propinsi, kabupaten dan desa. Wilayah nasional terbagi dalam daerah-daerah yang dalam pelaksanaannya menerapkan kebijaksanaan nasional melalui proses pengaturan pemerintah daerah (Hadjiroso, 1982 : 8).

Konsep pengembangan wilayah nasional Indonesia mempunyai tujuan yaitu 1. mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhan; 2. menciptakan kesatuan ekonomi nasional; 3. memelihara efisiensi pertumbuhan nasional (Hadjiroso, 1982 : 2). Ketiga tersebut saling terkait dan berjalan searah. Keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhan akan mendorong suatu daerah untuk memperkuat kesatuan ekonomi nasional, yang secara tidak langsung akan terpelihara pertumbuhan yang efisien. Begitu pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dapat mendorong dan memperkuat kesatuan ekonomi nasional.

Implementasi dari konsep pengembangan wilayah tersebut adalah kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan wilayah adalah dengan membentuk kelompok-kelompok wilayah pembangunan dengan berdasarkan perbatasan daerah, dengan memperhatikan satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Realisasi dari kebijakan tersebut adalah pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu suatu tinjauan obyek atas produk dari proses perkembangan wilayah yang berlaku untuk tiap satuan mekanisme pengembangan. Pada tingkat nasional dapat dijumpai satu atau lebih SWP. Berbeda dengan pengertian daerah, wilayah nasional tidak selalu terbagi dalam SWP-SWP tergantung tingkat pengembangan SWP bersangkutan. SWP dapat mencakup bagian dari suatu daerah, dapat juga mencakup beberapa bagian dari suatu daerah ataupun keseluruhan bagian dari suatu daerah (Hadjiroso, 1982: 18).

SWP merupakan berbagai jenis kegiatan dari pemerintah maupun masyarakat dan pelaksanaannya diatur dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui proyek pengembangan antar sektor, pada suatu

daerah atau lebih wilayah pembangunan yang menghubungkan beberapa daerah untuk membentuk kegiatan hubungan tiap sektor ekonomi. Dengan adanya Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) diharapkan tingkat pertumbuhan antar wilayah dapat ditingkatkan (Sukirno, 1979: 2).

Pengaruh besar adanya SWP ini akan tercapai kesempatan untuk tumbuh kegiatan-kegiatan usaha lebih tinggi, sehingga pertumbuhan suatu daerah akan lebih tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kemudahan-kemudahan pengembangan suatu daerah serta mewujudkan keseimbangan antar daerah untuk lebih efektif dan efisien (Sukirno, 1979 : 2).

2.2.5. Kesenjangan Antar Wilayah

Pembangunan yang selama ini pertumbuhan yang cukup tinggi, ternyata belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat atau berbagai golongan penduduk di seluruh daerah. Dengan kata lain pertumbuhan yang tinggi ternyata tidak diikuti dengan aspek psehingga menimbulkan permasalahan kesenjangan antar wilayah . adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah, perbedaan struktur ekonomi, infrastruktur (sarana dan prasarana) yang berbeda, aglomerasi serta kurangnya keterkaitan antar daerah, menimbulkan perbedaan dalam hal pola pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pemnangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang. Dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa selama tahap awal pembangunan disparitas regional akan terlihat sangat besar dan pembanguna terkonsentrasi kedalam daerah-daerah tertentu saja. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak ada kesenjangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Menurut Williamson kesenjangan antar wilayah yang semakin besar disebabkan oleh, pertama adanya migrasi tenaga kerja antar daerah yang bersifat selektif. Pada umumnya para migran tersebut terdidik, memiliki keterampilan yang tinggi, dan masih produktif. Kedua, adanya migrasi capital antar daerah , adanya rproses aglomerasi pada daerah yang relative kaya menyebabkan daya

tarik tersendiri bagi investor pada daerah lain yang berakibat terjadinya aliran capital ke daerah yang memang telah terlebih dahulu maju. Ketiga, adanya pembanguna sarana public pada daerah tertentu yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya kesenjangan antar wilayah yang lebih besar. Keempat, kurangnya keterkaitan antar daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya tingkat kesenjangan yang terjadi.

Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar wilayah yang berkelanjutan dan berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan akan tampak mendominasi dari efek yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah. Sehingga menyebabkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku ekonomi yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar wilayah yang cenderung semakin besar.

2.2.6. Konsep Analisis Indeks Gravitasi

Model gravitasi dalam perencanaan social ekonomi dikembangkan berdasarkan konsep hukum gravitasi Newton dalam ilmu fisika. Menurut hukum gravitasi Newton gaya tarik menarik antara dua benda bergantung pada perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik antara jarak di pusat-pusat massa kedua benda tersebut (Gaspers, 1990 : 109).

Analisis gravitasi dalam ekonomi, daerah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga saling mempengaruhi antara daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik (interaksi) antar daerah (Soewardjoko, 1984 : 43). Secara matematis indeks gravitasi adalah sebagai berikut :

$$I_{12} = a \frac{P_1 P_2}{(J_{12})^b}$$

- I_{12} = kekuatan gravitasi antara daerah satu dengan daerah 2
 a = konstanta
 P_1 = jumlah penduduk daerah pusat pertumbuhan (orang)
 P_2 = jumlah penduduk daerah belakang (orang)
 J_{12} = jarak fisik antara pusat pertumbuhan dan daerah belakang (Km)
 b = eksponen jarak yang besarnya 2

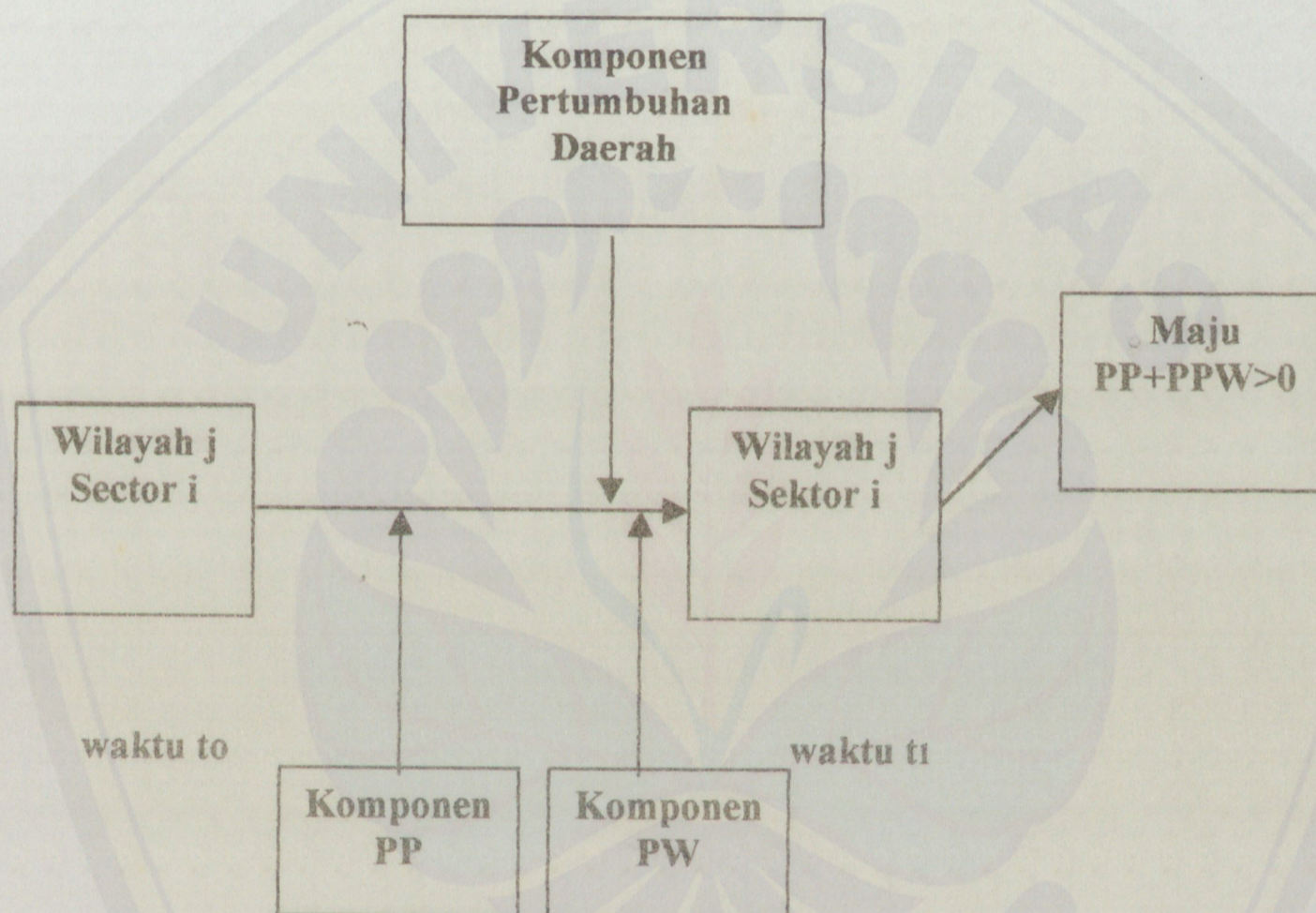
Indeks gravitasi dinyatakan besar apabila nilainya melebihi enam. Hal ini menunjukkan semakin besar indeks gravitasi semakin besar pula fungsi pusat-pusat pertumbuhan sebagai pelayanan daerah sekitarnya sehingga semakin besar pula pengaruhnya terhadap daerah belakang (hinterland).

Dengan menggunakan model gravitasi, maka akan dapat diukur interaksi antara dua daerah. Dalam hal ini Edward Ullman telah mensistematisasikan pengertian interaksi keruangan yang didasarkan pada tiga faktor yaitu : daerah yang saling melengkapi (region complementary), kesempatan berinteraksi dan kemudahan transfer. Komplementaritas adalah adanya daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal sumberdaya. Kondisi ini memungkinkan terjadinya interaksi keruangan yang cukup tinggi intensitasnya. Kesempatan berinteraksi adalah kemungkinan perantara yang menghambat interaksi. Kemudahan transfer adalah fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, juga termasuk karakteristik yang khusus dari daerah yang ditransfer. Komoditi tertentu dibutuhkan suatu daerah dari daerah lain yang tentu pula memiliki daya transfer yang tinggi (Sumaatmadja, 1981 : 52).

2.2.7. Konsep Analisis Shift Share

Analisis shift share ini menganalisis perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu. Selain itu, analisis shift share ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau komponen

pertumbuhan ekonomi yang lamban sekaligus mengetahui besarnya pergeseran peranan atau kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Analisis ini mengasumsikan bahwa perubahan produksi pada satu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis menjadi tiga komponen pertumbuhan yaitu : komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) (Supomo, 1993 : 44). Secara matematis model analisis shift share digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan dari komponen pertumbuhan tersebut adalah :

1. Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional secara umum atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah.
2. Komponen pertumbuhan proporsional timbul karena perbedaan sektor dalam permintaan produksi akhir, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

3. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena perbandingan peningkatan dan penurunan PDRB dalam suatu wilayah lainnya. Cepat atau lambat pertumbuhan suatu wilayah dengan wilayah lain ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana wilayah dan ekonomi serta kebijakan regional pada wilayah tersebut.

2.2.8. Konsep Indeks Williamson

Model ini membahas kesenjangan antar wilayah, dalam kaitan itu ada dua teori yang harus diperhatikan yaitu (Budiharsono, 1998 : 72) :

1. *Generative growth theory* menyatakan bahwa pada saat prekonomian nasional bertambah mantap, maka banyak persoalan ekonomi yang akan dapat diselesaikan. Beberapa wilayah tumbuh lebih cepat daripada wilayah lain, masalah distribusi and edistribusi menjadi tidak terlalu penting. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat apabila laju pertumbuhan ekonomi daerah blakang juga tumbuh lebih cepat juga.
2. *Competitive growth theory* berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh kekuatan eksogen. Kemudian laju pertumbuhan tersebut seolah-olah terbagi kedalam beberapa wilayah. Situasi ini terajadi apabila pertumbuhan ekonomi nasional lebih rendah dari pada lajunperumbuhan ekonomi wilayah.

Perkembangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain seharusnya sama. Tetapi melihat realita yang ada adalah erjadi perkembangan pembangunan yang tidak merata antar wilayah atau daerah. Kesenjangan tersebut tidak hanya nampak jelas, akan tetapi juga menampakkan kecwenderungan untuk tumbuh, hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapatan antar daerah. Dengan menggunakan analisis indeks Williamson akan dapat diketahui perbedaan tingkat pendapatan antar daerah dalam proses pembangunan (Nursyaman, 1996 : 249). Secara matematis model indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i / n}{\bar{Y}}}$$

dimana :

V_w : tingkat disparitas tertimbang

Y_i : pendapatan perkapita daerah belakang (hinterland)

\bar{Y} : pendapatan perkapita rata-rata pusat pertumbuhan

f_i : jumlah penduduk daerah belakang (hinterland)

n : jumlah penduduk pusat pertumbuhan

Indeks Williamson ini memberi indikasi apabila nilainya semakin mendekati angka satu, maka terjadi kesenjangan pembangunan di wilayah tersebut atau berarti terdapat kecenderungan terjadi kesenjangan pendapatan. Begitu pula sebaliknya apabila nilainya mendekati angka nol maka tingkat kesenjangan yang terjadi kecil.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomene-fenomena dengan indikator-indikator pendukung fenomena, tanpa mencari ada tidaknya pola hubungan antara indikator atau variabel pendukung indikator tersebut. Sedangkan komparatif adalah berusaha membandingkan dengan menggambarkan fenomena-fenomea dengan indkator-indikator pendukung fenomena di tiga wilayah SWP IV Jember tanpa mencoba mencari ada tidaknya pola hubungan antara indikator atau variabel pendukung variabel.

3.1.2. Unit Penelitian

Unit penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perilaku aktifitas sektor ekonomi di Satuan wilayah Pembangunan (SWP) IV Jember dilihat dari pengaruh kontribusi dan peranannya terhadap wilayah belakang (hinterland) mulai tahun 1997-2003. Pemilihan tahun tersebut dilakukan karena selama kurun waktu tersebut terdapat dua karakter ekoomi besar yaitu situasi krisis ekonomi dan situasi normal ekonomi.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SWP IV Jember berdasarkan pertimbangan bahwa SWP IV Jember dilalui oleh dua jalur utama lalu lintas Jawa-Bali. Selain itu Kabupaten Jember merupakan pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah disekitarnya.

3.1.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengguankan data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS Kabupaten Jember dan BAPPEDA Kabupaten Jember serta studi pustaka lainnya selama periode waktu 1997-2003.

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1. Analisis Indeks Gravitasi

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah belakang (hinterland) digunakan analisis indeks gravitasi. Secara matematis model ini adalah sebagai berikut :

$$I_{12} = a \frac{P_1 P_2}{(J_{12})^b}$$

I_{12} = kekuatan gravitasi antara daerah satu dengan daerah 2;

a = konstanta;

P_1 = jumlah penduduk daerah pusat pertumbuhan (orang);

P_2 = jumlah penduduk daerah belakang (orang);

J_{12} = jarak fisik antara pusat pertumbuhan dan daerah belakang (Km);

b = eksponen jarak yang besarnya 2

3.2.2. Analisis Shift Share

Untuk mengetahui kontribusi pertumbuhan ekonomi antar SWP di SWP IV Jember digunakan analisis shift share (Budiharsono, 1991 : 72) :

$$\Delta Y_{ij} = P N_{ij} + P P_{ij} + P W_{ij}$$

$$Y'_{ij} - Y_{ij} = Y_{ij}(R_a - 1) + Y_{ij}(R_j - R_a) + Y_{ij}(r_i - R_j)$$

keterangan :

$$r_i = Y'_{ij} / Y_{ij}$$

$$R_a = Y' / Y$$

$$R_i = Y'_{,i} / Y_i$$



dimana :

i : sektor ekonomi yang terdiri dari sembilan sektor yang dibagi kedalam tiga sektor utama yaitu sektor primer, sekunder dan tertier (1,2,3,...n);

j : wilayah tertentu (1,2,3,...n);

ΔY_{ij} : perubahan dalam produksi atau PDRB sektor i pada wilayah j ;

Y_{ij} : produksi atau PDRB sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis;

Y'_{ij} : produksi atau PDRB sektor i pada wilayah j pada tahun akhir analisis;

$(R_a - 1) = PN_{ij}$: presentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan nasional;

$(r_i - R_i) = PPW_{ij}$: presentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah;

$(R_i - R_a) = PF_{ij}$: presentase perubahan PDRB yang disebabkan kompnen pertumbuhan proporsional.

Dari penjumlahan dua komponen pertumbuhan wilayah yaitu komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah. Penjumlahan antar keduanya disebut Pergeseran Total (PT) yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$PT_j = PP_{ij} + PPW_{ij}$$

dimana :

PT_j = pergeseran total sektor i pada wilayah j

Apabila $PT_j > 0$ maka pertumbuhan wilayah j termasuk kelompok maju,

sedangkan apabila $PT_j < 0$ maka dapat dikatakan pertumbuhan wilayah j termasuk kedalam kelompok lamban.

3.2.3. Analisis Indeks Williamson

Untuk mengetahui tingkat kesenjangan di SWP IV Jember digunakan analisis indeks Williamson (Nursyaman, 1996 : 249) :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i / n}{\bar{Y}}}$$

dimana :

- V_w : tingkat disparitas tertimbang
- Y_i : pendapatan perkapita daerah belakang (hinterland)
- \bar{Y} : pendapatan perkapita pusat pertumbuhan
- f_i : jumlah penduduk daerah belakang (hinterland)
- n : jumlah penduduk pusat pertumbuhan

3.3. Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

1. PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, yang melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas dasar faktor produksi, dalam jutaan/ tahun.
2. Value added yaitu nilai tambah dari tiap sektor dimana nilai tambah setiap sektor dihitung dari nilai PDRB persektor permasalahannya pertahunnya atas dasar harga konstan.
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat perubahan ekonomi yang dihitung dari jumlah PDRB SWP IV Jember yang merupakan rata-rata tertimbang pertumbuhan sektoral (persen).
4. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk di SWP IV Jember pertengahan tahun 1991-2001 yang telah registrasi dalam satuan jiwa
5. Pendapatan Per Kapita merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam setahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk negara tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Satuan Wilayah Pembangunan IV Jember merupakan salah satu SWP di Wilayah Pembangunan Utama D Jawa Timur yang terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. SWP IV Jember terletak pada posisi $113^{\circ}48'$ - $114^{\circ}42'$ bujur timur dan $7^{\circ}35'$ - $7^{\circ}44'$ lintang selatan. Secara topografis bagian selatan di Kabupaten Jember banyak terbentuk dataran rendah dengan pantai selatannya di sisi paling selatan yang merupakan Samudera Hindia dan ke utara terbentang pegunungan Argopuro, di bagian tengah tepatnya di Kabupaten Bondowoso merupakan lembah diantara pegunungan Argopuro disebelah barat dan gunung Raung disebelah timurnya, sehingga wilayah ini termasuk dataran tinggi, dan dibagian utara di Kabupaten situbondo adalah dataran rendah dengan pantai utaranya di sisi paling utara yang merupakan selat Madura. Sebagai daerah yang memiliki banyak pegunungan dan di lalui sungai-sungai, daerah ini merupakan daerah yang subur sehingga daerah ini sangat potensial untuk sektor pertanian khususnya sub sector perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

SWP IV Jember memiliki total luas wilayah 6.492 Km^2 . Kabupaten Jember memiliki wilayah terluas sebesar $3.293,40 \text{ Km}^2$, Kabupaten Bondowoso sebesar $1.560,10 \text{ Km}^2$ dan Kabupaten situbondo sebesar $1.638,50 \text{ Km}^2$. Secara geografis SWP IV Jember memiliki batas yaitu di sebelah utara selat Madura, sebelah barat Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Proboilinggo, sebelah selatan Samudera Hindia dan sebelah timur adalah kabupaten Banyuwangi. SWP IV Jember merupakan jalur utama transportasi darat dari Jawa yang akan menuju ke Bali, baik itu jalur pantura di Kabupaten Situbondo maupun jalur selatan yang melalui Kabupaten Jember. Sebagai jalur utama transportasi Jawa-Bali yang cukup padat mobilitas transportasinya maka daerah SWP IV Jember khususnya

Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang sangat potensial bagi sektor perdagangan, hotel dan restoran.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di SWP IV Jember tahun 2003 mencapai 3.454.224 Jiwa meningkat sebesar 0.87% dari tahun sebelumnya. Kabupaten Jember sendiri memiliki penduduk terbanyak sebesar 2.131.289 jiwa meningkat sebesar 0.38%, kabupaten Bondowoso sebesar 696.049 jiwa meningkat 1.03% dari tahun sebelumnya dan Kabupaten Situbondo sebesar 626.886 jiwa meningkat 2.71% dari tahun sebelumnya.

Tabel 1. Jumlah penduduk di SWP IV Jember Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun, 2002-2003

No	Wilayah	2002 (jiwa)	2003 (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	Jember	2.123.168	2.131.289	0.38
2	Bondowoso	688.923	696.049	1.03
3	Situbondo	610.356	626.886	2.71
	Jumlah	3.424.247	3.454.224	0.87

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2004

Menurut etnis penduduk di SWP IV Jember banyak didiami oleh suku Madura dan sedikit dari suku Jawa. Terutama di Kabupaten Jember yang secara karakteristik antara suku Madura, Jawa dan Osing berimbang yang memunculkan etnis Pendalungan sedangkan di dua kabupaten lainnya masih didominasi oleh suku madura.

4.1.3 Kondisi Perekonomian

a. Struktur Perekonomian

Kegiatan perekonomian di SWP IV Jember dibagi dalam tiga sektor besar. Pertama adalah sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Kedua adalah sektor sekunder yaitu sektor yang mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah industri

pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi. Dan sektor tertier yaitu sektor yang tidak menghasilkan barang tapi jasa. Kegiatan yang termasuk dalam sektor ini adalah perdagangan, hotel dan restaurant; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya.

Perubahan dan perkembangan struktur perekonomian wilayah dapat dilihat dari komposisi ketiga sektor dalam perekonomian wilayah. Dilihat dari prosentase sumbangannya terhadap PDRB SWP IV Jember selama tahun 1997-2003, struktur perekonomian hampir mempunyai proporsi yang sama antara sektor primer dan tertier.

Dilihat dari struktur perekonomiannya SWP IV Jember dalam pengembangannya masih didominasi oleh sektor primer dan sektor tertier. Sejak tahun 1997 sektor tertier telah mampu memberikan kontribusinya di atas 45 % terhadap PDRB Jawa Timur. Sedangkan sektor primer mampu memberikan kontribusinya diatas 40 % setiap tahunnya. Dan sektor sekunder hanya mampu memberikan kontribusinya sebesar 10-12% setiap tahunnya.

Tabel 2. Struktur perekonomian Satuan wilayah Pembangunan IV Jember, 1997-2003 (dalam persen)

No	Tahun	Sektor		
		Primer	Sekunder	Tertier
1	1997	42,20	12,27	45,53
2	1998	41,53	10,19	48,28
3	1999	43,14	10,70	46,16
4	2000	43,37	10,60	46,23
5	2001	41,00	12,22	46,78
6	2002	41,58	12,10	46,32
7	2003	41,38	12,20	46,42

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2004

b. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi sektoral adalah gambaran mengenai kebijakan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun khususnya di bidang ekonomi. Secara umum kondisi perekonomian di SWP IV Jember di

masing-masing wilayah kabupatennya tidaklah jauh berbeda, masih didominasi oleh sektor pertanian yang pertumbuhannya cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi di SWP IV Jember pada tahun 1997 tumbuh secara fluktuatif. Kondisi ini diakibatkan adanya krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional yang berpengaruh terhadap perekonomian di daerah. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara drastis. Semua sektor ekonomi tumbuh minus, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor bangunan mengalami pertumbuhan minus yang cukup tinggi yaitu sebesar -30,61% dan -31,25% di bawah rata-rata pertumbuhan sebesar -13,6%. Kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa yang pertumbuhannya positif yaitu sebesar 1,96% dan 0,06%.

Sejak perekonomian nasional mulai pulih tahun 2000, pertumbuhan ekonomi di SWP IV Jember juga mulai menampilkan hasil yang positif. Sektor-sektor yang sebelumnya tumbuh minus pada tahun 2000 mulai mengalami peningkatan yang positif. Perekonomian mulai tampak stabil pada saat tahun 2003. Seluruh sektor-sektor ekonomi tumbuh positif rata-rata di atas 4,56%.

Sektor listrik, gas dan air bersih berada pada posisi tertinggi pertumbuhannya sebesar 7,09% dan diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,43%. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di SWP IV Jember hanya tumbuh sebesar 3,93% lebih kecil di bandingkan dengan sektor-sektor sekunder seperti industri pengolahan dan bangunan tumbuh sebesar 4,78% dan 4,50%. Sedangkan sektor tertier seperti perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 5,04%, pengangkutan dan komunikasi tumbuh 4,55%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 2,68%. Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang pertumbuhannya paling kecil sebesar 2,12%.

Beberapa sektor tumbuh secara fluktuatif sejak tahun 1997-2003. hanya ada beberapa sektor yang pertumbuhannya dapat dikatakan cukup stabil seperti sektor pertanian bahkan sektor ini menunjukkan trend yang positif paska krisis ekonomi. Stabilitasnya sektor ini dikarenakan wilayah di SWP IV Jember memang

merupakan daerah yang potensial untuk sektor pertanian dan merupakan daerah agraris sehingga sector pertanian merupakan sector prioritas di wilayah ini.

Table 3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral SWP IV Jember, 1997-2003

No	Sektor	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	3,20	-6,63	3,73	1,56	2,94	2,45	3,93
2	Pertambangan dan penggalian	-4,96	-30,61	18,34	3,35	2,47	10,76	6,34
3	Industri pengolahan	5,38	-26,70	0,79	-1,42	1,98	3,78	4,78
4	Listrik, gas dan air bersih	5,87	-8,01	9,33	5,21	5,46	5,86	7,09
5	Bangunan	1,38	-31,25	-6,21	2,10	1,58	6,17	4,50
6	Perdagangan, hotel dan restoran	5,95	-10,76	-10,76	3,84	3,07	3,64	5,04
7	Pengangkutan dan komunikasi	5,98	1,96	2,38	7,59	4,61	5,26	4,55
8	Keuangan, persewaan dan jasa keuangan	6,43	-10,59	-2,72	2,38	4,91	1,96	2,68
9	Jasa-jasa	3,36	0,06	-1,64	7,22	2,24	4,37	2,12
	Rata-rata	3,62	-13,61	0,94	3,54	3,25	4,92	4,56

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2004

c. Perkembangan Perekonomian Daerah

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan perekonomian daerah adalah angka PDRB daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian suatu daerah dan sekaligus menjelaskan besaran aktivitas perekonomian ekonomi daerah tersebut. Dengan PDRB dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu daerah.

Data PDRB mempunyai peranan yang sangat penting untuk menganalisa pembangunan daerah . pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangannya sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan karena peningkatannya berarti suatu keberhasilan dalam proses pembangunan.

Tabel 4. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di SWP IV Jember, 1997-2003

No	Tahun	PDRB (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	1997	3.739.889.700	-
2	1998	3.389.029.400	-0,09
3	1999	3.297.891.442	-0,03
4	2000	3.394.017.126	0,03
5	2001	3.728.269.602	0,10
6	2002	3.921.743.770	0,05
7	2003	4.150.160.508	0,06

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2004

Pada tahun 1997 PDRB SWP IV Jember mempunyai nilai sebesar 3.739.889.700. pada saat krisis melanda PDRB SWP IV Jember turun sebesar -0,09 %. Akan tetapi, sejak tahun 1998 nilai PDRB mulai mengalami peningkatan lagi meskipun belum signifikan. Baru pada tahun 2002 PDRB kembali pada posisi tertinggi sejak krisis sebesar 3.921.743.770. dan pada tahun 2003 PDRB kembali tumbuh sebesar 0,06 % dari tahun 2002.

Secara per wilayah Kabupaten Jember mempunyai nilai PDRB tertinggi dibandingkan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2003 PDRB Kabupaten Jember sebesar 2.482.735.930 diikuti Kabupaten Situbondo sebesar 1.017.259.457 dan Kabupaten Bondowoso sebesar 650.255.121.

d. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai tolak ukur hasil pembangunan yang telah diterima oleh masyarakat tiap tahunnya (satu periode). Pendapatan per kapiat mencerminkan adanya perolehan sesungguhnya yang telah

diterima oleh masyarakat dan hal-hal yang bersifat sosial dan kuantitatif kurang diperhitungkan disini.

Pendapatan perkapita di SWP IV Jember perkembangannya fluktuatif. Pada saat krisis tahun 1998 tumbuh minus sebesar $-0,12\%$. Kemudian mencapai angka tertinggi pada tahun 2000 pertumbuhannya mencapai $0,22\%$ dan turun lagi sebesar $-0,10\%$. Pada tahun 2002-2003 kembali tumbuh meskipun belum signifikan.

Table 5. Perkembangan Pendapatan Per Kapita SWP IV Jember , 1997-2003 (dalam rupiah)

No	Tahun	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	1997	1.153.378	-
2	1998	1.019.141	-0,12
3	1999	1.025.175	0,01
4	2000	1.251.157	0,22
5	2001	1.127.060	-0,10
6	2002	1.193.536	0,05
7	2003	1.240.551	0,04

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2004

4.1.4 Kebijakan Pembangunan SWP IV Jember

Pembangunan wilayah SWP IV Jember merupakan bagian dari pembangunan daerah Jawa Timur yang sekaligus integral dari pembangunan nasional, maka perlu adanya keserasian antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 tahun. 1996 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi Jawa Timur tahun 1997/1998-2011/2012, Bab. V tentang Pokok-pokok Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi Jawa Timur, Bagian 10 pasal 38 (1) berisi tentang struktur SWP Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember dan sekitarnya termasuk dalam SWP IV dengan Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhannya. Sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Jember memiliki mobiltas laju penduduk, faktor produksi, barang dan

jasa, komunikasi serta transportasi yang lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya di SWP IV Jember. Pembentukan SWP mempunyai harapan bahwa kegiatan pembangunan yang terpusat di Kabupaten Jember dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan daerah belakangnya yang pada akhirnya akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan dalam ruang ekonomi di daerah belakang. Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah berfungsi sebagai pusat pemasaran, distribusi, pelayanan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan pengembangan wilayah di SWP IV Jember.

Prioritas pengembangan di SWP IV Jember di arahkan pada kegiatan perniagaan, pendidikan, pariwisata dan fasilitas pendukungnya di pusat pertumbuhannya, dengan dukungan wilayah belakangnya yaitu pada pengembangan sektor dan sub sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pariwisata dan agro industri.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Indeks Gravitasi Di Satuan Wilayah Pembangunan IV Jember Tahun 1997-2003

Indeks Gravitasi pada dasarnya adalah menghitung interaksi keruangan suatu wilayah. Interaksi ruang pada hakekatnya menggambarkan mobilitas penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain yang secara implisit menggambarkan terjadinya mobilisasi sumberdaya. Penyebab terjadinya interaksi ruang adalah terdapatnya hubungan saling ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain, dapat diartikan adanya saling ketergantungan sumberdaya dalam melakukan suatu kegiatan yang bertujuan pemenuhan kebutuhan.

Pusat pertumbuhan mendorong pertumbuhan daerah belakang melalui proses pembelian faktor-faktor produksi dari daerah belakang dan menjadi daerah pemasaran tenaga kerja dan bahan mentah bagi daerah belakang. Proses ini juga disamakan dengan interaksi ruang dan jika berlangsung terus menerus maka akan semakin mengembangkan potensi daerah belakang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pusat pertumbuhan.

Tingkat interaksi yang terjadi antar wilayah bila di jelaskan adalah sebagai berikut : 1. Variable jarak adalah ekuivalen, jadi bias berupa jarak, waktu tempuh, ongkos angkutan dan lain-lain. 2. Obyek yang berinteraksi juga ekuivalen , jadi bisa berupa jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, harga barang-barang dan lain-lain. Dalam analisis ini variable pilih yang digunakan adalah variable jarak dan jumlah penduduk dengan asumsi bahwa mobilitas penduduk atau dikatakan sumberdaya manusia merupakan juga sumberdaya secara umum karena tujuan daripada interaksi tersebut adalah proses dalam ruang lingkup kegiatan perekonomian. Dan jarak adalah salah satu faktor penting dalam mempengaruhi tingkat mobilitas sumberdaya dengan memperhatikan waktu tempuh dan biaya transportasi.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi di SWP IV Jember Dengan Menggunakan variabel Pilih Jumlah Penduduk dan Jarak, 1997-2003

No	Tahun	Daerah	Jarak (Km)	Indeks Gravitasi	Pertumbuhan (persen)
1.	1997	Jember- Bondowoso	32	4.03224	-
2	1998	Jember-Bondowoso	32	4.03266	0.01
3	1999	Jember-Bondowoso	32	4.03463	0.04
5	2000	Jember-Bondowoso	32	4.03751	0.09
6	2001	Jember-Bondowoso	32	4.04084	0.10
7	2002	Jember-Bondowoso	32	4.04144	0.01
8	2003	Jember-Bondowoso	32	4.04321	0.04
1.	1997	Jember-Situbondo	67	3.30790	-
2	1998	Jember-Situbondo	67	3.30827	0.01
3	1999	Jember-Situbondo	67	3.30978	0.04
5	2000	Jember-Situbondo	67	3.31405	0.12
6	2001	Jember-Situbondo	67	3.31508	0.03
7	2002	Jember-Situbondo	67	3.31660	0.04
8	2003	Jember-Situbondo	67	3.32019	0.10

Sumber : Lampiran 3 data diolah

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa semakin jauh jarak antara daerah satu dengan yang lain akan menyebabkan tingkat interaksi ruang yang terjadi relatif semakin rendah dan semakin dekat jarak antara dua wilayah maka menyebabkan tingkat interaksi ruang yang terjadi semakin tinggi.

Tingkat interaksi ruang di SWP IV Jember yang menghubungkan pusat pertumbuhan Kabupaten Jember dan daerah belakangnya yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan bahwa tingkat interaksi tertinggi yaitu antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso yang nilai indeks gravitasinya berkisar antara 4.03-4.04 sepanjang tahun 1997-2003. dibandingkan dengan interaksi yang terjadi antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Situbondo yang relatif lebih kecil yaitu dengan nilai indeks gravitasi sebesar 3.30-3.32 sepanjang tahun 1997-2003. Lebih tingginya tingkat interaksi antara kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso memang dapat dikatakan karena jarak yang menghubungkan keduanya relatif lebih dekat yaitu sejauh 32 Km bandingkan dengan jarak yang menghubungkan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Situbondo yang berada pada radius yang cukup jauh yaitu 67 Km.

Dari hasil interaksi ruang yang terjadi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang di SWP IV Jember, interaksi ruang tersebut tidak dapat diterjemahkan secara mutlak karena bersifat relatif atau tidak mengoptimalkan melainkan hanya memprediksi yang mungkin akan terjadi dalam interaksi ruang atau *expected interaction*.

4.2.2 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah di SWP IV Jember

Pergeseran total pertumbuhan ekonomi antar wilayah (PTij) pada tahun 1997-2003 dapat diketahui melalui penjumlahan prosentase perubahan PDRB yang disebabkan oleh komponen pertumbuhan proporsional (PPij) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPWij). Kriteria pertumbuhannya adalah apabila $PTij > 0$ maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut adalah cepat atau maju dan apabila $PTij < 0$ maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut adalah lamban.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Pergeseran Total Pertumbuhan Ekonomi di SWP IV Jember, 1997-2003

No	Wilayah	PPij	PPWij	PTij	Keterangan
1	Jember	107894957,20	-6459665,15	101435292,10	Maju
2	Bondowoso	923454,51	-93284168,46	-92360713,95	Lamban
3	Situbondo	894936,05	47855057,84	48749993,89	Maju

Sumber : lampiran 19

Dari data tersebut di SWP IV Jember daerah yang mengalami kemajuan pesat pertumbuhan ekonominya adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo. Sedangkan Kabupaten Bondowoso adalah daerah yang pertumbuhannya lebih lamban.

Daerah dapat dikatakan maju dan lamban pertumbuhan ekonominya di tentukan oleh keunggulan komparatif daerah tersebut, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan kebijakan ekonomi regional pada daerah tersebut. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB untuk tiap-tiap wilayah tersebut.

4.2.3 Tingkat Kesenjangan Antar Wilayah di SWP IV Jember, 1997-2003

Peranan pusat pertumbuhan bagi pengembangan wilayah dapat ditunjukkan dengan ada dan tidaknya kesenjangan pendapatan antar masing-masing wilayah terutama antar pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya. Kesenjangan pendapatan dapat menunjukkan apakah pusat pertumbuhan efektif atau tidak dalam mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan daerah belakangnya.

Indeks Williamson memberikan indikasi apabila nilainya semakin tinggi, semakin tinggi pula ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut. Atau ada kecenderungan terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah. Kriterianya adalah semakin mendekati angka 0 berarti kesenjangan semakin kecil dan semakin mendekati angka 1 menunjukkan semakin besar terjadinya kesenjangan.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Tingkat Kesenjangan Wilayah di SWP IV Jember, 1997-2003

No	Wilayah	Nilai Indeks Williamson						
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Jember	0.41	0.38	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38
2	Bondowoso	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13
3	Situbondo	0.45	0.61	0.45	0.59	0.59	0.58	0.57

Sumber : lampiran 21-27

Dari hasil perhitungan indeks williamson dapat dilihat bahwa tingkat kesenjangan pendapatan di wilayah SWP IV Jember cukup tinggi. Nilai indeks williamson di SWP IV Jember berkisar antara 0.12-0.61 selama tahun 1997-2003. Wilayah yang menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi di tunjukkan oleh Kabupaten Situbondo yang berada pada level di atas 0.45-0.61. sedangkan Kabupaten Bondowoso adalah wilayah yang tingkat kesenjangan pendapatannya terkecil yaitu antara 0.12-0.15. Kabupaten jember sebagai pusat pertumbuhan tingkat kesenjangan juga relatif kecil karena masih berada pada level antara 0.38-0.41 dan cukup stabil sepanjang tahun 1997-2003. Adanya tingkat kesenjangan pendapatan yang besar di sebabkan adanya perbedaan masing-masing wilayah dalam mengambil suatu kebijakan pembangunan regionalnya, letak geografis, suku, potensi dan juga jarak antar wilayah.

4.3 Pembahasan

Di SWP IV Jember konsep regionalisasi dalam kebijaksanaanya di bagi dalam tiga wilayah pengembangan yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Jember tentunya diharapkan dapat memberikan peranannya dalam hal pengembangan wilayah dan pertumbuhan bagi daerah belakangnya. Seperti yang disampaikan oleh Glasson (1991 : 172) dalam teori pusat pertumbuhan bahwa terdapat kekuatan -kekuatan di ruang ekonomi yang terdiri dari pusat-pusat di mana memancar kekuatan sentripetal di tarik. Artinya bahwa dalam suatu ruang

ekonomi terdapat suatu kekuatan ekonomi yang dapat memancarkan kekuatannya bagi ruang-ruang ekonomi lain di sekitarnya.

Satuan Wilayah Pembangunan merupakan manifestasi dari konsep regionalisasi dengan teori pusat-pusat pertumbuhannya. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan antar wilayah serta mewujudkan keseimbangan antar wilayah untuk dapat lebih efektif dan efisien.

Hubungan timbal balik antara pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya merupakan hubungan yang saling menguntungkan dan melengkapi. Pusat pertumbuhan merupakan daerah pemasaran hasil-hasil produksi bagi daerah belakang serta penyedia berbagai fasilitas, sarana dan prasarana bagi daerah belakang untuk pengembangan wilayahnya. Sedangkan daerah belakang merupakan penyedia sumberdaya baik itu tenaga kerja maupun faktor-faktor produksi lainnya bagi pusat pertumbuhan. Asumsi inilah yang mendasari adanya interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang.

Proses perkembangan suatu daerah terjadi akibat interaksi keruangan berdasarkan prinsip aglomerasi atau skala ekonomi menuju efisiensi dimana ekonomi pusat pertumbuhan menyebabkan wilayah yang lebih besar dan tinggi pertumbuhannya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi daerahnya sendiri dan pusat kegiatan ekonomi dari daerah yang lebih kecil atau daerah belakang. Sehingga daerah yang lebih kecil akan sangat tergantung pada tersedianya kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. Seperti pendapat Myrdal (Nursyaman, 1996 : 243) bahwa tempat-tempat yang akan menarik adalah tempat yang memiliki dan membina kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan perekonomian. Sehingga daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif di bandingkan daerah lainnya.

Pada pusat pertumbuhan terdapat leading sektor atau sektor yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya polarisasi dari sektor-sektor lainnya yang saling bergantung. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai macam keuntungan aglomerasi yang secara implisit akan menimbulkan polarisasi geografik dimana terjadi aliran-aliran sumberdaya dan konsentrasi ekonomi pada

pusat-pusat pertumbuhan yang jumlahnya terbatas sebagai akibat dari kualitas propulsif pusat pertumbuhan yang dinamis.

Hasil indeks gravitasi dalam mengukur interaksi keruangan di SWP IV Jember memberikan hasil bahwa Kabupaten Jember memberikan peranannya terhadap daerah belakangnya yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo meskipun dalam intensitas interaksi ruang yang kecil. Khususnya intensitas keruangan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo yang sangat kecil karena terkendala oleh jarak antar kedua wilayah tersebut yang cukup jauh. Hal ini akan sangat menghambat proses terjadinya mobilitas interaksi sumberdaya antar kedua wilayah tersebut. Dengan pertimbangan variabel jarak tersebut ekuivalen yaitu bisa berupa jarak itu sendiri, waktu tempuh dan biaya transportasi.

Disamping itu, posisi Kabupaten Situbondo yang cukup strategi karena dilalui juga oleh jalur transportasi utama Jawa-Bali merupakan alternatif pilihan dalam berinteraksi dengan daerah lainnya seperti Probolinggo di sebelah barat dan Banyuwangi di sebelah timur, meskipun jarak keduanya relatif lebih jauh daripada Kabupaten Jember. Peluang aksesibilitas sumberdaya di Kabupaten Situbondo bahkan dapat di katakan lebih luas karena lebih dekat dengan Surabaya yang merupakan pusat pertumbuhan utama Jawa Timur.

Fenomena lain yang menjelaskan adanya interaksi keruangan antar wilayah di SWP IV Jember adalah adanya perkembangan penduduk yang cukup tinggi di pusat pertumbuhan. Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhan memiliki peran penting sebagai pusat pelayanan publik, pusat pemasaran dan memiliki banyak fasilitas yang dapat menjadi daya tarik penduduk di wilayah belakang untuk datang ke pusat pertumbuhan. Secara tidak langsung akan menciptakan konsentrasi sub-urban baru.

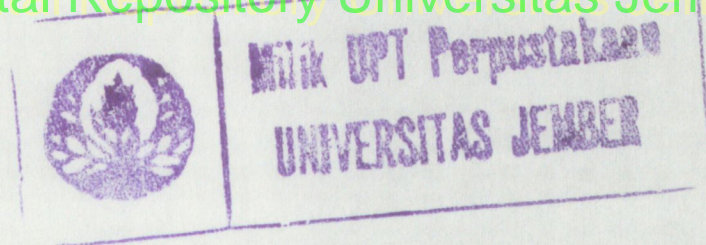
Disamping itu, interaksi ruang yang terjadi dapat mendorong perkembangan daerah belakang yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang di terima penduduk daerah belakang. Pasca krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional tingkat pendapatan perkapita

penduduk di SWP IV Jember dari tahun ke tahun selalu meningkat meskipun pertumbuhannya fluktuatif dan belum menunjukkan trend yang positif.

Kecilnya intensitas keruangan yang terjadi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang di SWP IV Jember menghasilkan adanya daerah yang pertumbuhan ekonominya maju dan ada juga yang pertumbuhan ekonominya lamban. Pengklasifikasian daerah kedalam dua kelompok yaitu daerah yang pola pertumbuhannya tinggi dan pola pertumbuhannya rendah adalah untuk menilai sejauh mana ketimpangan pembangunan terjadi, terutama pembagian wilayah di SWP IV Jember selama tahun 1997-2003. Daerah yang memiliki pola pertumbuhan rendah adalah daerah yang mengalami perkembangan, tetapi perkembangannya tidak mencapai taraf yang dapat dicapai oleh daerah lainnya yang lebih maju.

Hasil analisis shift share yang menunjukkan pergeseran total pertumbuhan ekonomi antar wilayah menghasilkan bahwa Kabupaten Bondowoso adalah satu-satunya wilayah di SWP IV Jember yang pertumbuhan ekonominya paling lamban. Sedangkan Kabupaten Situbondo meskipun jaraknya dengan pusat pertumbuhan relatif jauh justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini terjadi karena di Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan komparatif, akses ke pasar dan dukungan kelembagaan serta sarana dan prasarana sosial ekonomi yang lebih menunjang. Khususnya kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten Situbondo lebih baik daripada kontribusi sektoral terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso.

Ketidakseimbangan dalam pola pertumbuhan antar wilayah karena keunggulan komparatif yang terjadi di masing-masing wilayah berbeda-beda sehingga menyebabkan tidak semua daerah memiliki pola pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sesuai dengan pendapat Richardson (1991 : 39) bahwa keunggulan komparatif sektor-sektor ekonomi yang dimiliki suatu daerah akan menyebabkan suatu daerah akan tumbuh lebih cepat. Pendapat Glasson (1990 : 94) mengenai terjadinya perbedaan pola pertumbuhan disebabkan pola struktur ekonomi yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Myrdal juga berpendapat dalam analisisnya pada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya



ketidakseimbangan di berbagai daerah, yaitu *back wash effect* dan *spread effect*. Suatu daerah yang lebih maju akan berkembang lebih cepat daripada yang kurang maju karena faktor-faktor yang menimbulkan *spread effect* ke daerah yang lebih miskin dan menyebabkan ketidakseimbangan yang makin lama semakin bertambah di berbagai daerah (Nursyaman, 1996 : 243).

Demikian pula yang terjadi di SWP IV Jember dimana Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo memiliki pola pertumbuhan ekonomi yang tinggi sedangkan Kabupaten Bondowoso pola pertumbuhannya ekonominya rendah. Selain itu, Kabupaten Bondowoso kurang memiliki keunggulan komparatif di sektor-sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunannya. Hampir seluruh sektor kontribusi yang dihasilkan jauh tertinggal dengan dua wilayah lainnya. Sedangkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo dengan keunggulan komparatifnya masing-masing mampu berjalan lebih cepat. Kecilnya intensitas ruang yang terjadi antara Kabupaten Bondowoso dengan pusat pertumbuhan semakin memperlamban proses pertumbuhan ekonominya.

Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhan mempunyai pola pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga hasil analisis shift share menunjukkan bahwa Kabupaten Jember adalah wilayah yang pertumbuhan ekonominya maju. Sebagai pusat pertumbuhan tentunya Kabupaten Jember memiliki keunggulan komparatif di sektor-sektor ekonomi yang cukup tinggi. Didukung pula dengan peran kelembagaan, sarana dan prasarana yang sangat mendukung bagi perkembangan daerah, akses ke pasar lebih luas yang menyebabkan tingkat mobilitas sumberdaya yang cukup tinggi dan yang lebih penting adalah kebijakan ekonomi regionalnya yang mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya.

Kecilnya intensitas keruangan juga berdampak pada perbedaan perkembangan pembangunan antar daerah. Seharusnya perkembangan pembangunan antar daerah tersebut sama. Akan tetapi, pada kenyataannya adalah perbedaan itu tidak hanya nampak jelas bahkan cenderung untuk terus tumbuh. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan pendapatan antar daerah di SWP IV Jember.

Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah di SWP IV Jember yang relatif cukup tinggi. Kabupaten Situbondo termasuk wilayah yang pertumbuhan ekonominya maju. Akan tetapi, tingkat kesenjangan pendapatan di Kabupaten Situbondo adalah yang paling tinggi di dibandingkan dengan dua wilayah lainnya. Khususnya Kabupaten Bondowoso meskipun termasuk wilayah yang pertumbuhan ekonominya lamban. Akan tetapi tingkat kesenjangan pendapatannya termasuk yang terendah.

Tinggi dan rendahnya tingkat kesenjangan tersebut disebabkan perbedaan masing-masing wilayah dalam mengambil kebijakan ekonomi regionalnya, letak geografis masing-masing wilayah dalam mendukung peningkatan pendapatannya, serta jarak antar wilayah yang merupakan faktor kendala dalam berinteraksi.

Peningkatan pendapatan perkapita hanyalah merupakan sebagian dari indeks kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi mengandung pertimbangan nilai mengenai tingkat distribusi pendapatan yang diinginkan. Karena itu kesejahteraan ekonomi tidak hanya mempertanyakan bagaimana keadilan distributif tersebut, tetapi juga membicarakan bagaimana komposisi hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati dan bagaimana masyarakat dapat menilai atas apa yang telah di terimanya. Sehingga pendapatan perkapita tidak akan berarti apa-apa jika proses distribusinya tidak merata dan menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar.

Secara umum perkembangan wilayah di SWP IV Jember belum dapat dikatakan optimal, karena Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhan belum sepenuhnya memberikan peran yang optimal bagi daerah belakangnya. Lemahnya interaksi ruang yang berdampak pada adanya daerah yang pertumbuhan ekonominya masih lamban dan masih tingginya tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah menunjukkan konsep regionalisasi di SWP IV Jember belum sepenuhnya berjalan. Sehingga perlu adanya perencanaan yang matang dan tepat dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat interaksi ruang antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya di SWP IV Jember menunjukkan adanya suatu tingkatan yang berbeda antar wilayah. Berdasarkan penghitungan indeks Williamson dalam menghitung tingkat interaksi ruang antar wilayah dengan menggunakan variabel jarak dan jumlah penduduk di masing-masing wilayah didapatkan hasil bahwa interaksi ruang tertinggi adalah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso sepanjang tahun 1997-2003 sebesar 4.03224-4.04321 dengan jarak sejauh 32 Km². Sedangkan hasil indeks gravitasi terendah dihasilkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo sepanjang tahun 1997-2003 sebesar 3.30790-3.32019 dengan jarak sejauh 67 Km².

Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang maka akan semakin kecil pula tingkat interaksi ruang yang terjadi. Begitupun sebaliknya semakin dekat jarak antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang maka semakin besar pula tingkat interaksi yang terjadi.

Dengan demikian pusat pertumbuhan Kabupaten Jember hanya berperan lebih besar terhadap Kabupaten Bondowoso. Sedangkan terhadap Kabupaten Situbondo pusat pertumbuhan Kabupaten Jember diduga kurang memiliki peranan yang cukup besar.

2. Selama kurun waktu 1997-2003 hasil perhitungan shift share dalam menghitung pergeseran total pertumbuhan ekonomi menghasilkan bahwa Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhan merupakan daerah yang pertumbuhannya ekonominya paling maju di SWP IV Jember dengan nilai sebesar 101435292.10. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang pertumbuhannya paling lambat dengan nilai sebesar -92360713.95. Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup maju dengan nilai sebesar 48749993.89.

dengan demikian maka pusat pertumbuhan kontribusinya terhadap daerah belakang masih sangat rendah.

3. Tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah dari hasil perhitungan analisis indeks williamson di SWP IV Jember adalah sebesar 0.12-0.61. berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah di SWP IV Jember selama tahun 1997-2003 relatif masih cukup tinggi.

5.1. Saran-saran

1. Dalam konsep regionalisasi perencanaan pembangunan daerah yang di tuangkan dalam Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Jawa Timur perlu diperhatikan juga kondisi dan potensi masing-masing daerah dalam pola pembangunannya agar tidak terjadi lagi ketimpangan antar wilayah dimana terdapat daerah yang pertumbuhannya lebih maju dan ada pula yang pertumbuhannya lamban. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah di SWP IV Jember. Khususnya yang terkait penetapan Kabupaten Situbondo sebagai daerah belakang di SWP IV Jember, mengingat wilayah ini sudah termasuk daerah yang pertumbuhannya sudah cukup maju serta jarak dengan pusat pertumbuhan di Kabupaten Jember cukup jauh, yang menyebabkan tingkat interaksinya rendah.
2. Perbedaan geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia membawa implikasi corak pembangunan di masing-masing wilayah berbeda pula. Sehingga proses pembangunan serta kebijakan yang diambil haruslah sesuai dengan kondisi serta situasi masing-masing daerah tersebut. Selain itu perlu adanya realokasi sumberdaya terutama yang relative baru di wilayah hinterland, supaya daerah tersebut dapat lebih berkembang lagi pertumbuhan ekonominya.
3. Untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah perlu adanya peningkatan aktifitas ekonomi di tiap-tiap daerah khususnya daerah yang selama ini dianggap tertinggal. Sehingga daerah tersebut dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah yang lebih maju. Dalam hal ini

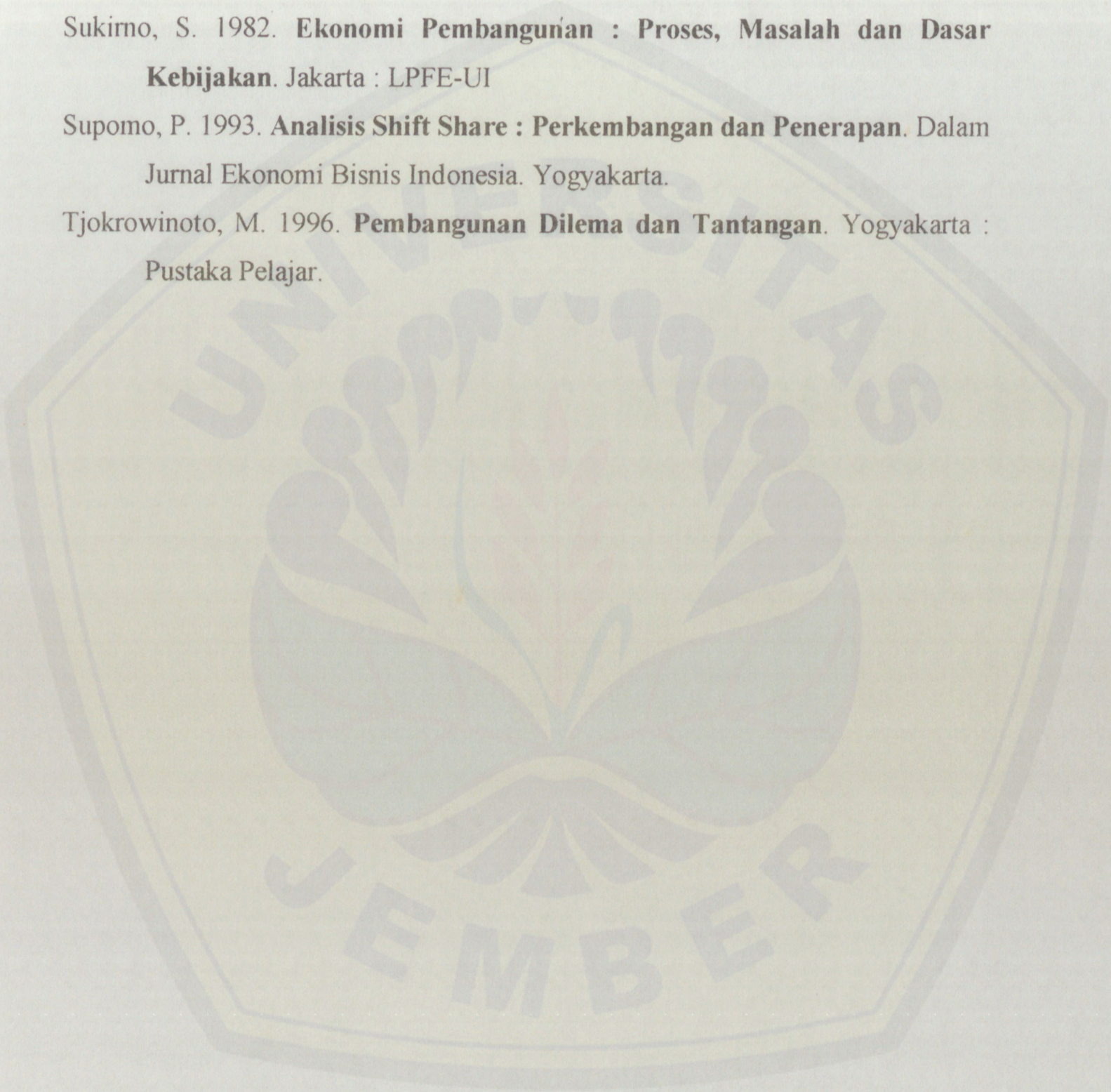
pemerintah haruslah cermat dalam mengambil suatu kebijakan ekonomi, apa yang daerah tersebut butuhkan dan perlu di prioritaskan pembangunannya. Sehingga keunggulan komparatif yang ada di wilayah tersebut dapat di manfaatkan seoptimal mungkin dan pada akhirnya dapat pula menekan tingkat kesenjangan antar wilayah.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1990. **Pengantar Perencanaan Pembangunan daerah**. Yogyakarta : BPFE.
- Azis, Iwan Jaya. 1994. **Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia**. Jakarta : LPFE-UI.
- BAPPEDA. 1990. **Evaluasi Rencana Pembangunan Kota Kabupaten Jember 1990-2013**. Jember BPS. 2000. PDRB Kabupaten Jember tahun 2000. Jember.
- BAPPEPROV. 2004. **Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi Jawa Timur tahun 1997/1998-2011/2012**. Surabaya Pemprov Jatim.
- Budiharsono, SU.1991. **Perencanaan Pembngunan Wilayah : Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya**. Jakarta : FE-UI.
- Gaspersz, Vincent. 1990. **Analisis Kuantitatif Untuk Perencanaan**. Bandung : ITB.
- Glasson, J. 1990. **Pengatur Perencanaan Regional, Terjemahan Paul Sitorang**. Jakarta : LPFE-UI.
- Hadjiroso, P. 1990. **Konsep Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia**. Jakarta : DPU.
- Harry W, Richardson. 1991. **Dasar-dasar Ilmu Regional : Terjemahan Paul Sitorang**. Jakarta : LPFE-UI.
- Jhingan, M.L. 1998. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Jakarta : Raja Wali Press.
- Kumalasari, Dyah. 2002. **Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Kesenjangan Pendapatan Antar wilayah Dalam Kaitan Pengembangan Perwilayahan di Satuan Wilayah Pembangunan VII Kediri**. Jember : FE-UNEJ.
- Nursyaman. 1996. **Pengembangan Konsep Pusat Pertumbuhan Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia**. Jakarta : Media Ekonomi Trisakti.

- Robiatin, 2000. **Implementasi Pembangunan Daerah Tingkat II Dalam Kaitan Pengembangan Perwilayahan Pembangunan di SWP VIII Madiun Tahun 1993-1996**. Jember : FE-UNEJ.
- Sukirno, S. 1979. **Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah**. Jakarta : LPFE-UI.
- Sukirno, S. 1982. **Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan**. Jakarta : LPFE-UI
- Supomo, P. 1993. **Analisis Shift Share : Perkembangan dan Penerapan**. Dalam Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia. Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, M. 1996. **Pembangunan Dilema dan Tantangan**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.



Lampiran 1. Jumlah Penduduk di SWP IV Jember Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun, 1997-2003

Wilayah	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Jember	2.078.071	2.083.068	2.106.632	2.114.103	2.120.074	2.123.968	2.131.289
Bondowoso	661.412	661.915	663.511	674.725	688.344	689.923	696.046
Situbondo	579.647	580.243	581.080	600.202	603.705	610.356	626.886
jumlah	3.319.760	3.325.226	3.351.223	3.389.030	3.412.123	3.424.247	3.454.224

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2004

Lampiran 2 : Tabel Jarak Antar wilayah di Jawa Timur

JARAK ANTAR KOTA KABUPATEN/KOTAMADYA DATI II DI JAWA TIMUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Surabaya	0	18	23	49	79	108	45	103	169	181	193	198	276	123	119	154	167	186	89	60	99	145	191	194	197	288	28	90	123	175
G r e s i k	18	0	41	67	97	90	27	85	187	199	211	216	294	141	137	172	185	204	107	78	117	163	209	191	288	28	108	123	175	
Sidoarjo	23	41	0	72	102	131	68	126	192	204	216	221	298	145	142	177	144	208	66	37	76	122	168	171	288	51	113	141	193	
Mojokerto	49	67	72	0	30	115	57	110	120	132	144	149	227	74	70	105	118	137	89	61	100	146	192	195	288	77	139	172	224	
Jombang	79	97	102	30	0	85	80	81	90	102	114	119	197	44	40	75	88	107	119	91	130	176	222	225	228	319	107	169	202	254
Bojonegoro	108	90	131	115	85	0	63	65	110	78	112	139	217	129	125	160	173	192	134	105	168	207	253	298	202	305	396	136	198	231
Lamongan	45	27	68	57	80	63	0	58	177	187	201	206	284	131	127	162	175	194	134	163	202	248	284	297	300	391	131	193	226	278
T u b a n	103	95	126	110	82	65	58	0	172	184	196	201	279	126	122	157	170	189	191	181	220	266	312	315	338	407	127	259	292	344
Madiun	169	187	192	128	90	110	177	172	0	32	24	29	107	78	50	109	122	82	178	181	220	278	324	327	330	407	127	259	292	344
N g a w i	181	199	264	132	102	78	189	184	32	0	34	61	139	90	62	121	134	114	190	193	232	278	324	327	330	407	127	259	292	344
Magetan	193	211	216	144	114	113	201	190	24	34	0	53	131	102	74	133	146	106	202	205	244	290	336	339	342	433	221	283	316	368
Ponorogo	198	216	221	148	119	139	206	201	29	61	53	0	78	115	79	84	117	52	195	210	249	211	341	344	347	438	226	283	321	373
Pacitan	276	294	298	227	197	217	284	179	107	139	131	78	0	180	157	149	182	117	270	213	352	276	390	421	358	462	364	366	399	451
Kediri	123	141	146	74	44	129	131	126	78	90	102	115	180	0	28	31	44	63	100	156	194	217	386	289	299	383	151	213	246	296
Nganjuk	119	137	142	70	40	125	127	122	50	62	74	79	157	28	0	59	72	96	128	131	170	216	386	285	268	359	147	209	242	294
Tulungagung	154	172	177	105	75	160	162	157	109	121	132	84	149	44	72	33	0	64	78	133	172	236	328	331	334	361	195	257	290	342
Blitar	167	185	144	118	86	173	175	170	122	134	146	117	182	44	72	33	0	64	78	133	172	236	328	331	334	361	195	257	290	342
Trenggalek	196	204	206	137	107	192	194	189	82	114	106	57	117	63	90	32	64	0	142	197	236	236	328	331	334	361	195	257	290	342
Malang	89	107	66	89	119	197	134	192	178	190	202	195	290	100	26	111	78	142	0	55	94	117	194	189	192	259	117	179	212	264
Pasuruan	60	78	37	61	91	168	105	163	181	193	205	210	313	155	131	166	133	197	55	0	39	85	131	134	137	228	86	150	183	235
Probolinggo	90	117	76	100	130	207	144	202	220	232	244	240	352	194	170	205	172	236	94	39	0	46	105	140	140	222	177	235	268	320
Lumajang	145	163	122	146	176	253	190	248	266	276	290	211	276	217	216	205	172	236	117	85	46	105	0	35	32	126	219	281	314	306
Bondowoso	191	209	168	192	222	299	236	294	312	324	336	341	390	386	362	300	267	331	167	134	95	140	0	0	67	94	222	284	317	389
Situbondo	194	212	171	195	225	302	239	297	345	327	339	344	421	289	208	300	270	334	192	137	96	72	32	32	67	105	225	287	320	372
Jember	197	215	174	196	228	305	242	300	318	330	342	347	358	292	268	303	270	334	192	137	96	72	32	67	105	225	287	320	372	
Banyuwangi	288	306	265	289	319	396	333	391	407	421	433	436	462	364	366	399	451	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
Bangkalan	28	46	51	77	107	136	73	131	197	209	221	226	304	151	147	182	195	214	117	86	127	173	219	222	225	316	0	62	95	147
Sampang	90	108	113	139	169	196	135	193	259	271	283	288	366	213	209	144	257	276	179	150	189	235	281	294	287	375	62	0	33	85
Pamekasan	123	141	145	172	202	231	168	226	292	304	316	321	399	246	242	277	290	309	212	183	222	268	314	317	320	411	95	0	52	0
Sumenep	175	193	196	224	254	283	220	278	344	356	368	373	451	286	294	329	342	361	264	235	274	320	372	463	372	463	85	0	52	0

Lampiran 3. Perhitungan Indeks Gravitasi

$$I_{12} = a \frac{P_1 P_2}{(J_{12})^b}$$

Keterangan :

- I_{12} = kekuatan gravitasi antara daerah satu dengan daerah 2
- a = konstanta yang nilainya 1
- P_1 = jumlah penduduk daerah pusat pertumbuhan (orang)
- P_2 = jumlah penduduk daerah belakang (orang)
- J_{12} = jarak fisik antara pusat pertumbuhan dan daerah belakang (Km)
- b = eksponen jarak yang besarnya 2

Perhitungan :

1. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Bondowoso Tahun 1997

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.078.071 \times 661.412)}{\text{Log}(32)^2} = 4.03224$$

2. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Situbondo Tahun 1997

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.078.071 \times 579.647)}{\text{Log}(67)^2} = 3.30790$$

3. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Bondowoso Tahun 1998

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.083.068 \times 661.915)}{\text{Log}(32)^2} = 4.03266$$

4. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Situbondo Tahun 1998

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.083.068 \times 661.915)}{\text{Log}(67)^2} = 3.30827$$

5. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Bondowoso Tahun 1999

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.106.632 \times 663.511)}{\text{Log}(32)^2} = 4.03463$$

6. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Situbondo Tahun 1999

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.106.632 \times 663.080)}{\text{Log}(67)^2} = 3.30978$$

7. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Bondowoso Tahun 2000

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.114.103 \times 674.725)}{\text{Log}(32)^2} = 4.03755$$

8. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Situbondo Tahun 2000

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.114.103 \times 600.202)}{\text{Log}(67)^2} = 3.31405$$

9. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Bondowoso Tahun 2001

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.120.074 \times 688.344)}{\text{Log}(32)^2} = 4.04084$$

10. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Situbondo Tahun 2001

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.120.074 \times 603.705)}{\text{Log}(67)^2} = 3.31508$$

11. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Bondowoso Tahun 2002

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.123.968 \times 689.923)}{\text{Log}(32)^2} = 4.04144$$

12. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Situbondo Tahun 2002

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.123.968 \times 610.356)}{\text{Log}(67)^2} = 3.31660$$

13. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Bondowoso Tahun 2003

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.131.289 \times 696.049)}{\text{Log}(32)^2} = 4.04321$$

14. Indeks Gravitasi Kabupaten Jember -Kabupaten Situbondo Tahun 2003

$$I_{JB} = 1 \frac{\text{Log}(2.131.289 \times 626.886)}{\text{Log}(67)^2} = 3.32019$$

Sumber : Lampiran 1 dan 2, data diolah januari 2005

Lampiran 4. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 1997
Atas Dasar Harga Konstan 1993

No	Sektor	Nilai	Prosentase
1	Pertanian	991.547.770	43.88
2	Pertambangan dan penggalian	10.454.920	0.46
3	Industri pengolahan	147.382.560	6.52
4	Listrik, gas dan air bersih	28.965.930	1.28
5	Bangunan	89.965.930	3.98
6	Perdagangan, hotel dan restoran	455.455.500	20.16
7	Pengangkutan dan komunikasi	139.392.020	6.17
8	Kecelakaan, persediaan dan jasa keuangan	156.083.050	6.92
9	Jasa-jasa	240.227.560	10.63
	Jumlah	2.259.475.240	100

Sumber : BPS Pemprov Jawa Timur, 2004

Lampiran 5. Sumbangan Sektorial Terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 1997
Atas Dasar Harga Konstan 1993

No	Sektor	Nilai	Prosentase
1	Pertanian	253.995.220	40.38
2	Pertambangan dan penggalian	720.250	0.11
3	Industri pengolahan	24.519.560	3.90
4	Listrik, gas dan air bersih	3.498.350	0.56
5	Bangunan	27.173.490	4.32
6	Perdagangan, hotel dan restoran	104.295.730	16.58
7	Pengangkutan dan komunikasi	24.743.610	3.93
8	Keuangan, persewaan dan jasa keuangan	46.747.990	7.43
9	Jasa-jasa	143.395.000	22.79
Jumlah		629.089.190	100

Sumber : BPS Pemprov Jawa Timur, 2004

Lampiran 6. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 1997
Atas Dasar Harga Konstan 1993

No	Sektor	Nilai	Prosentase
1	Pertanian	315.903.740	35.93
2	Pertambangan dan penggalian	5.692.780	0.65
3	Industri pengolahan	100.073.780	11.38
4	Listrik, gas dan air bersih	7.019.070	0.80
5	Bangunan	31.269.540	3.56
6	Perdagangan, hotel dan restoran	242.132.090	27.54
7	Pengangkutan dan komunikasi	58.622.750	6.67
8	Keuangan, persewaan dan jasa keuangan	49.807.000	5.66
9	Jasa-jasa	68.628.220	7.81
Jumlah		879.149.160	100

Sumber : BPS Pemprov Jawa Timur, 2004

Lampiran 7. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 2003
Atas Dasar Harga Konstan 1993

No	Sektor	Nilai	Prosentase
1	Pertanian	1.033.510.690	41.63
2	Pertambangan dan penggalian	11.323.950	0.46
3	Industri pengolahan	170.503.540	6.86
4	Listrik, gas dan air bersih	41.574.450	1.67
5	Bangunan	66.320.880	2.67
6	Perdagangan, hotel dan restoran	553.333.290	22.29
7	Pengangkutan dan komunikasi	170.968.590	6.89
8	Keuangan, persewaan dan jasa keuangan	151.768.000	6.11
9	Jasa-jasa	283.432.540	11.42
Jumlah		2.482.735.930	100

Sumber : BPS Pemprov Jawa Timur, 2004

Lampiran 8. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2003
Atas Dasar Harga Konstan 1993

No	Sektor	Nilai	Prosentase
1	Pertanian	315.963.395	48.60
2	Pertambangan dan penggalian	1.349.635	0.22
3	Industri pengolahan	58.005.287	8,92
4	Listrik, gas dan air bersih	3.494.302	0.54
5	Bangunan	23.735.369	3.65
6	Perdagangan, hotel dan restoran	105.817.238	16.27
7	Pengangkutan dan komunikasi	19.750.758	3.04
8	Keuangan, persewaan dan jasa keuangan	52.970.831	0.68
9	Jasa-jasa	59.078.306	0,08
Jumlah		650.255.121	100

Sumber : BPS Pemprov Jawa Timur, 2004

Lampiran 9. Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Atas Dasar Harga Konstan 1993

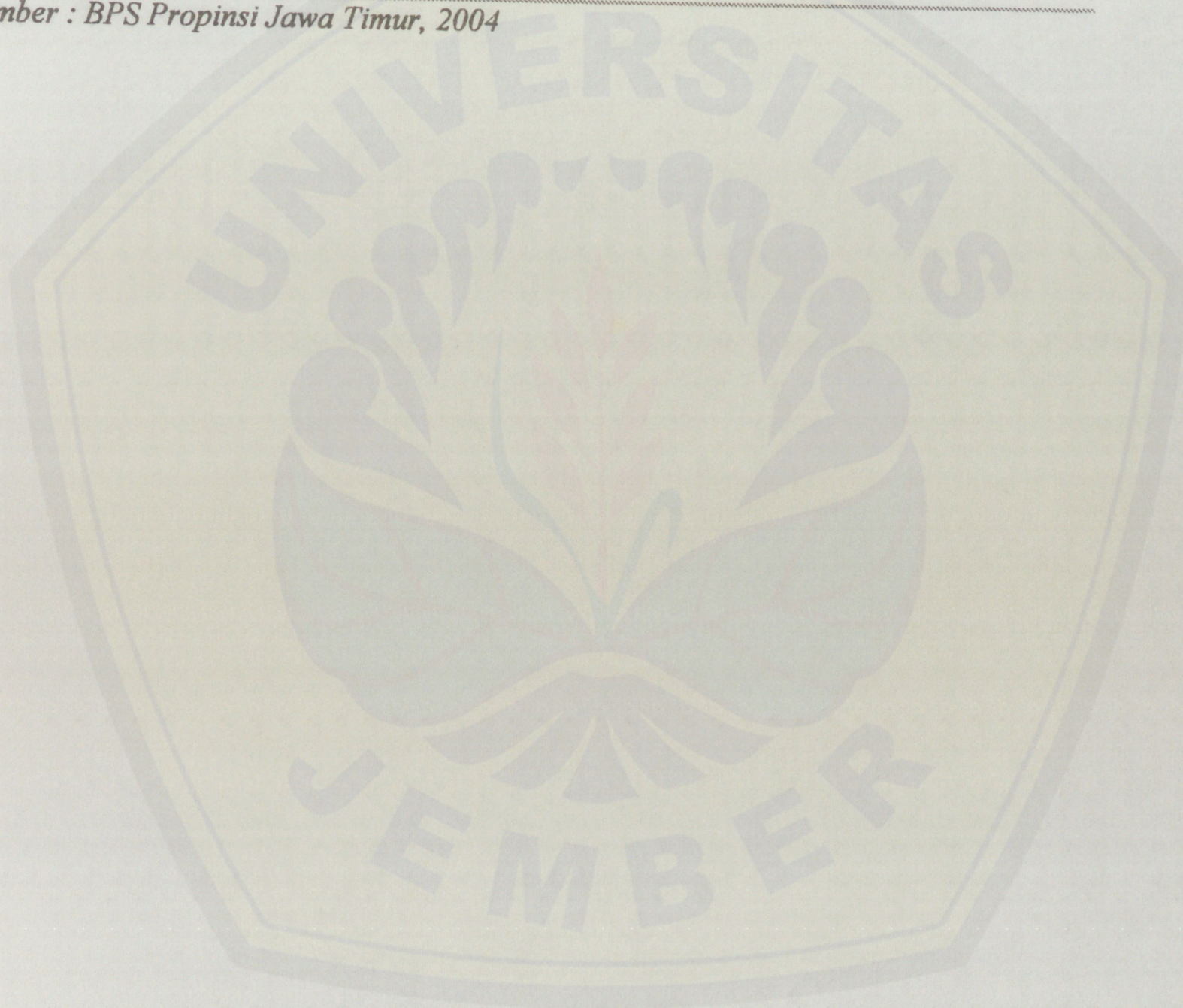
No	Sektor	Nilai	Prosentase
1	Pertanian	347.932.220	34.20
2	Pertambangan dan penggalian	7.323.888	0.72
3	Industri pengolahan	94.544.731	9.29
4	Listrik, gas dan air bersih	10.748.043	1.06
5	Bangunan	37.570.592	3.69
6	Perdagangan, hotel dan restoran	288.580.196	28.37
7	Pengangkutan dan komunikasi	79.706.725	7.83
8	Keuangan, persewaan dan jasa keuangan	59.161.794	5.82
9	Jasa-jasa	91.691.268	9.02
	Jumlah	1.017.259.457	100

Sumber : BPS Pemprov Jawa Timur, 2004

Lampiran 10. Peranan Sektoral (PDRB) SWP IV Jember Tahun 1997 ADHK 1993

No	Wilayah	Sektor			Jumlah
		Primer	Sekunder	Tertier	
1	Jember	1.002.002.690	266.314.420	991.158.130	2.259.475.240
2	Bondowoso	254.715.470	55.191.400	319.182.330	629.089.200
3	Situbondo	321.596.520	138.362.580	419.190.060	879.149.160
	Jumlah	1.578.314.680	459.868.400	1.729.530.520	3.767.771.600

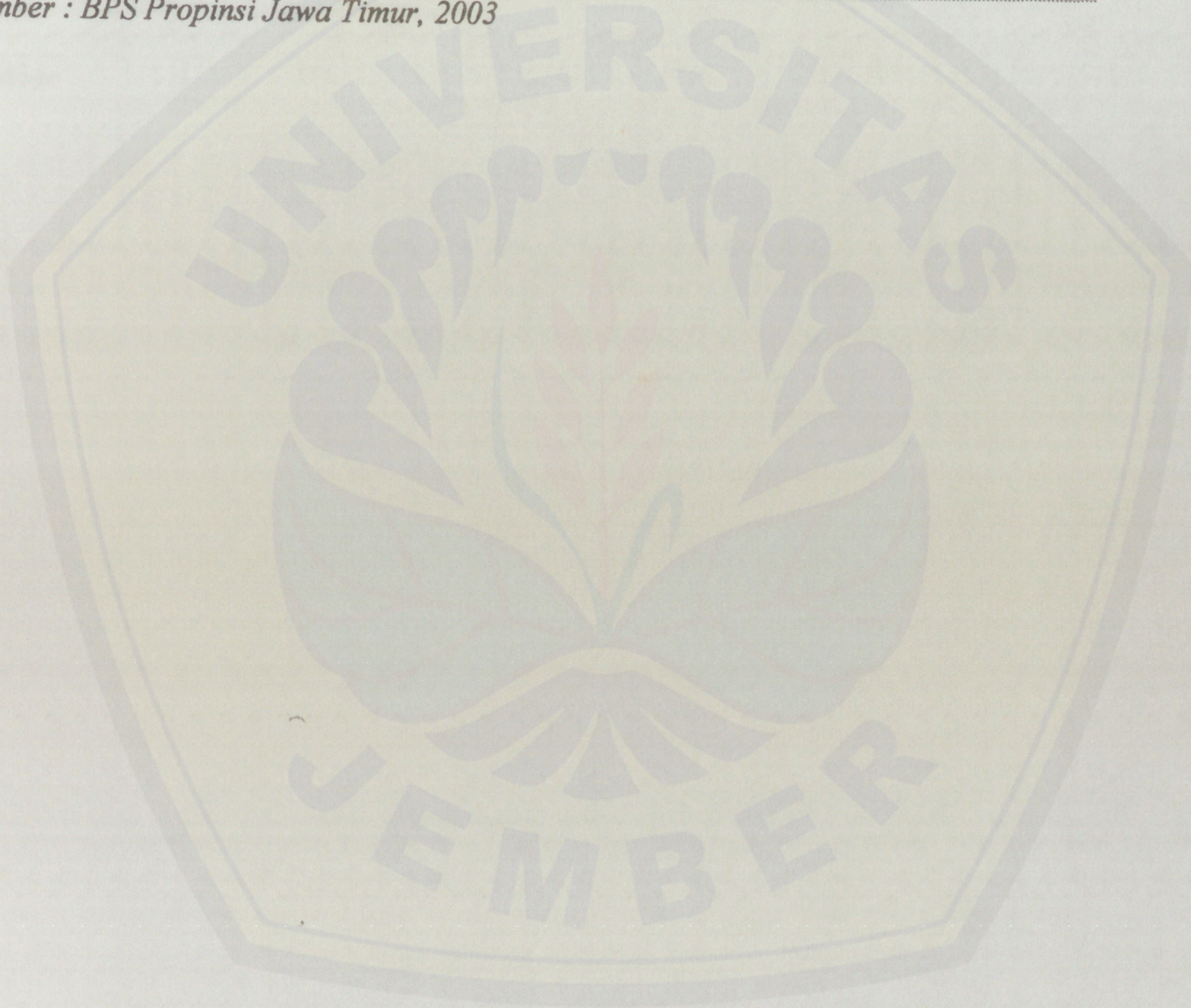
Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2004



Lampiran 11. Peranan Sektoral (PDRB) SWP IV Jember Tahun 2003 ADHK 1993

No	Wilayah	Sektor			Jumlah
		Primer	Sekunder	Tertier	
1	Jember	1.044.834.640	278.398.870	1.159.502.420	2.482.735.930
2	Bondowoso	317.313.030	85.324.958	247.617.133	650.255.121
3	Situbondo	355.256.108	142.863.366	519.139.983	1.017.259.457
	Jumlah	1.717.403.778	506.587.194	1.926.259.536	4.150.250.508

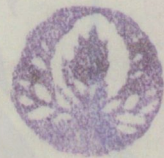
Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2003



Lampiran 12. Peranan Sektoral (PDRB) SWP IV Jember Tahun 1997 dan 2003
ADHK 1993

No	Wilayah	Sektor		Jumlah
		1997	2003	
1	Primer	1.578.314.680	1.717.403.778	3.295.718.458
2	Sekunder	459.686.400	506.587.194	966.273.594
3	Tertier	1.729.530.520	1.926.259.536	3.655.790.056
	Jumlah	3.767.631.600	4.150.250.508	7.917.782.108

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2004



Milik DPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Lampiran 13. Perhitungan nilai ri, Ra, Ri

$$r_i = \frac{Y'_{ij}}{Y_{ij}}$$

Y'_{ij} : produksi atau PDRB sektor i pada wilayah j pada tahun akhir analisis

Y_{ij} : produksi atau PDRB sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis

Perhitungan :

Jember

$$r_p = \frac{1.044.834.640}{1.002.002.690} = 1.04275$$

$$r_s = \frac{278.398.870}{266.314.420} = 1.04538$$

$$r_t = \frac{1.159.502.420}{991.158.130} = 1.16985$$

Bondowoso

$$r_p = \frac{317.313.030}{254.715.470} = 1.24575$$

$$r_s = \frac{85.324.958}{55.191.400} = 1.54598$$

$$r_t = \frac{247.617.133}{319.182.330} = 0.77578$$

Situbondo

$$r_p = \frac{355.256.108}{321.596.520} = 1.10466$$

$$r_s = \frac{142.863.366}{138.362.580} = 1.03253$$

$$r_t = \frac{519.139.983}{419.190.060} = 1.23843$$

Nilai Ra

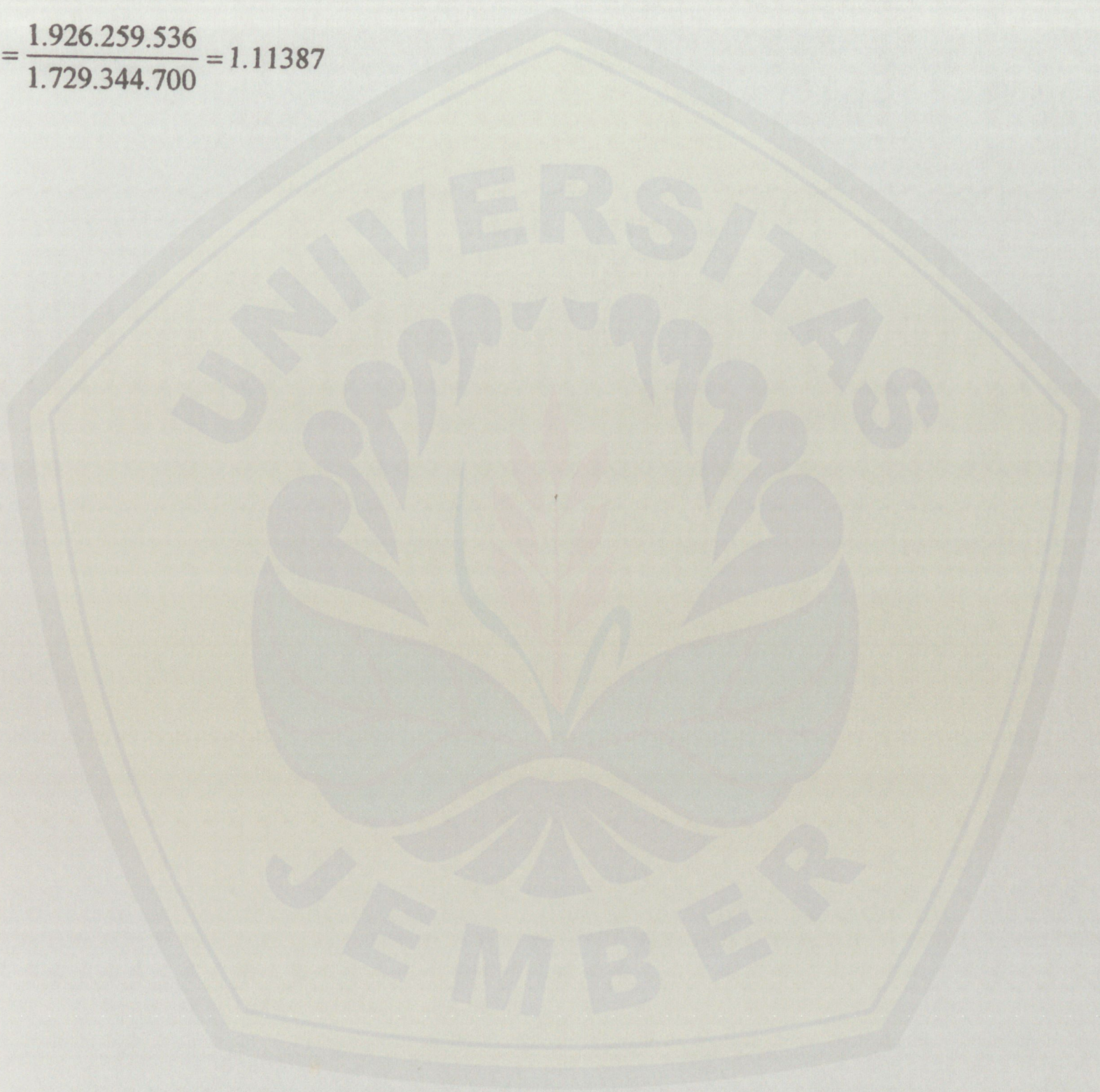
$$Ra = \frac{4.150.250.508}{3.767.631.600} = 1.10155$$

Nilai Ri

$$R_p = \frac{1.171.403.778}{1.578.314.680} = 1.08812$$

$$R_s = \frac{506.587.194}{459.499.500} = 1.10248$$

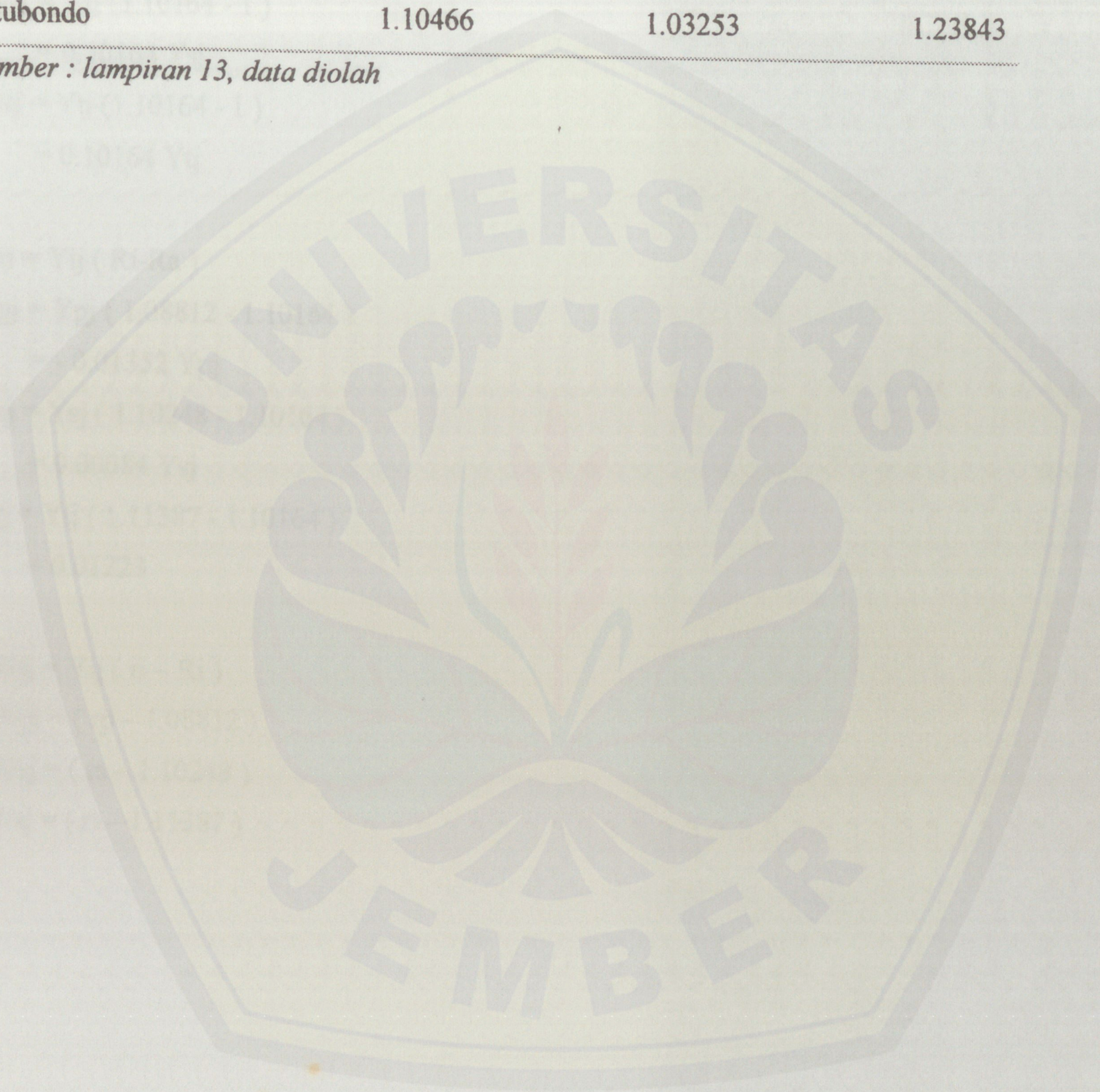
$$R_t = \frac{1.926.259.536}{1.729.344.700} = 1.11387$$



Lampiran 14. perhitungan rp, rs, st

Wilayah	rp	rs	rt
Jember	1.04275	1.04538	1.16985
Bondowoso	1.24575	1.54598	0.77578
Situbondo	1.10466	1.03253	1.23843

Sumber : lampiran 13, data diolah



Lampiran 15 : perhitungan PNij, PPij, PPWij

$$PN_{ij} = Y_{ij} (R_a - 1)$$

$$PN_{pj} = Y_{pj} (1.10164 - 1)$$

$$= 0.10164 Y_{pj}$$

$$PN_{sj} = Y_{sj} (1.10164 - 1)$$

$$= 0.10164 Y_{sj}$$

$$PN_{tj} = Y_{tj} (1.10164 - 1)$$

$$= 0.10164 Y_{tj}$$

$$PP_{ij} = Y_{ij} (R_i - R_a)$$

$$PP_{pj} = Y_{pj} (1.08812 - 1.10164)$$

$$= - 0.01352 Y_{pj}$$

$$PP_{sj} = Y_{sj} (1.10248 - 1.10164)$$

$$= 0.00084 Y_{sj}$$

$$PP_{tj} = Y_{tj} (1.11387 - 1.10164)$$

$$= 0.01223$$

$$PPW_{ij} = Y_{ij} (r_i - R_i)$$

$$PPW_{pj} = (r_p - 1.08812)$$

$$PPW_{sj} = (r_s - 1.10248)$$

$$PPW_{tj} = (r_t - 1.11387)$$

Lampiran 16. Hasil Perhitungan Komponen Pertumbuhan Nasional Antar Wilayah Menurut Sektor di SWP IV Jember, 1997-2003

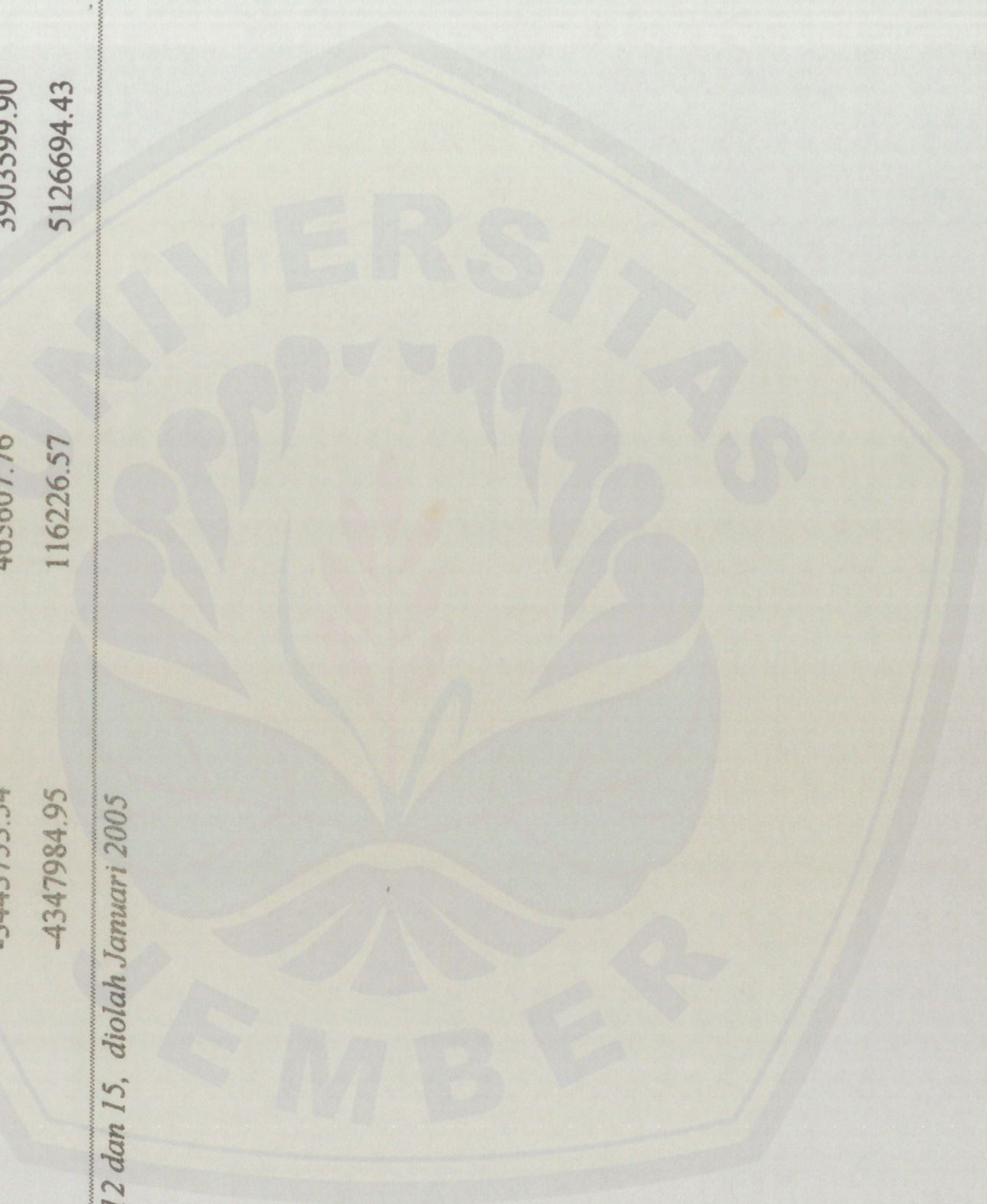
Wilayah	PNpj	PNsj	PNtj	PNij
Jember	101843553.40	27030702.65	100741312.30	229615568.35
Bondowoso	25889280.37	5609653.89	32441692.02	63940626.28
Situbondo	32687070.29	14063172.63	42606477.70	89356720.62

Sumber : lampiran 12 dan 15, diolah Januari 2005

Lampiran 17. Hasil Perhitungan Komponen Pertumbuhan Proporsional Antar Wilayah Menurut Sektor di SWP IV Jember ,
1997-2003

Wilayah	PPpj	PPsj	PPTj	PPij
Jember	-13547076.37	223394.24	121218693.30	107894957.20
Bondowoso	-3443753.54	463607.76	3903599.90	923454.51
Situbondo	-4347984.95	116226.57	5126694.43	894936.05

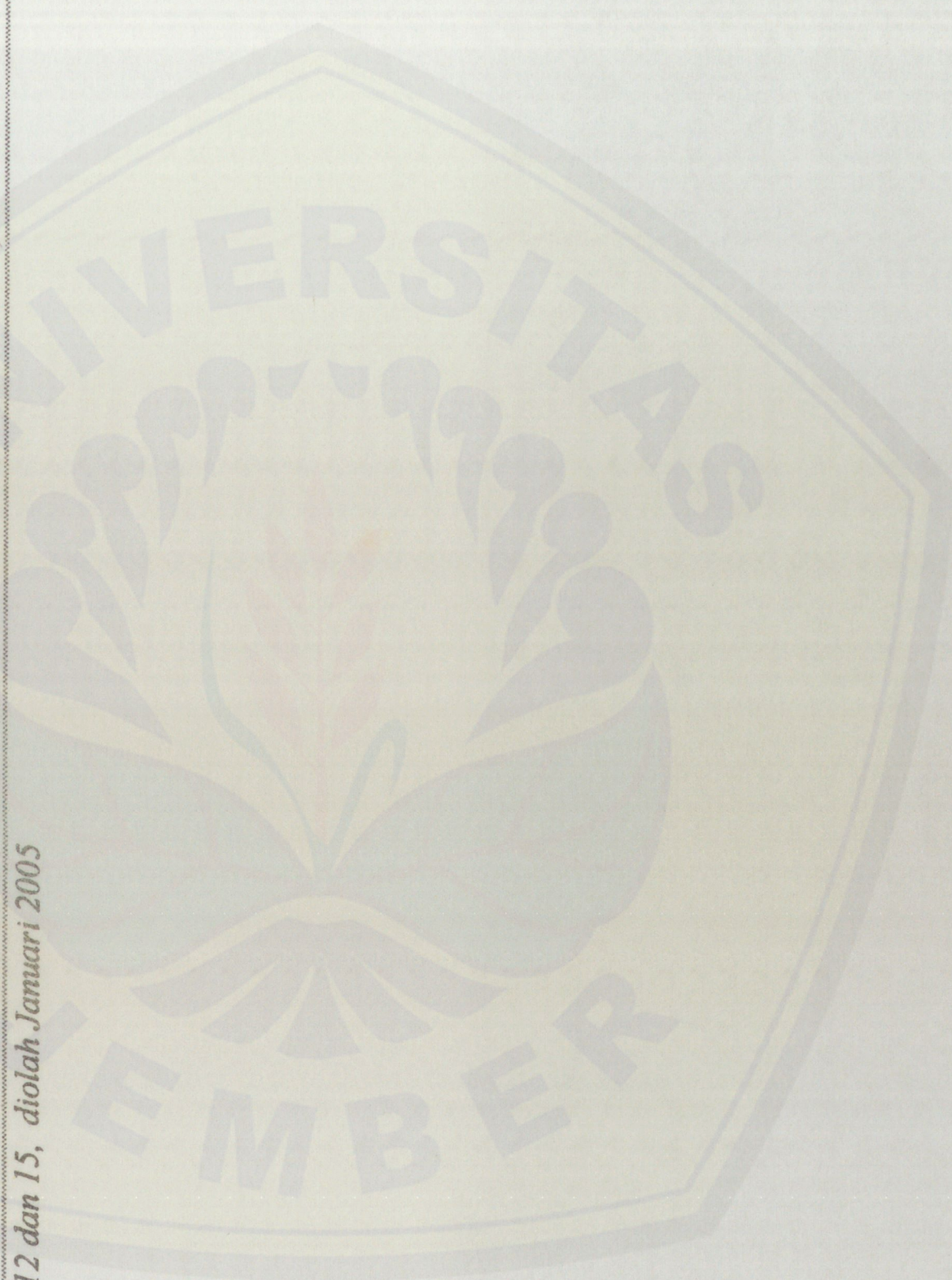
Sumber : lampiran 12 dan 15, diolah Januari 2005



Lampiran 18. Hasil Perhitungan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Antar Wilayah Menurut Sektor di SWP IV Jember ,
1997-2003

Wilayah	PPWpj	PPWsj	PPWtj	PPWij
Jember	-45460862.05	-14799868.19	5548032.12	-4775698.12
Bondowoso	40150799.54	24477385.90	-107912353.90	-43284168.46
Situbondo	5319206.44	-9678462.84	52214313.87	47855057.84

Sumber : lampiran 12 dan 15, diolah Januari 2005



Lampiran i9. Hasil Perhitungan Pergeseran Total (PTij) di SWP IV Jember, 1997-2003

Wilayah	PPpj	PPWsj	PTtj	keterangan
Jember	107894957.20	-6459665.15	101435292.10	Maju
Bondowoso	923454.51	-93284168.46	-92360713.95	Lamban
Situbondo	894936.05	47855057.84	48749993.89	Maju

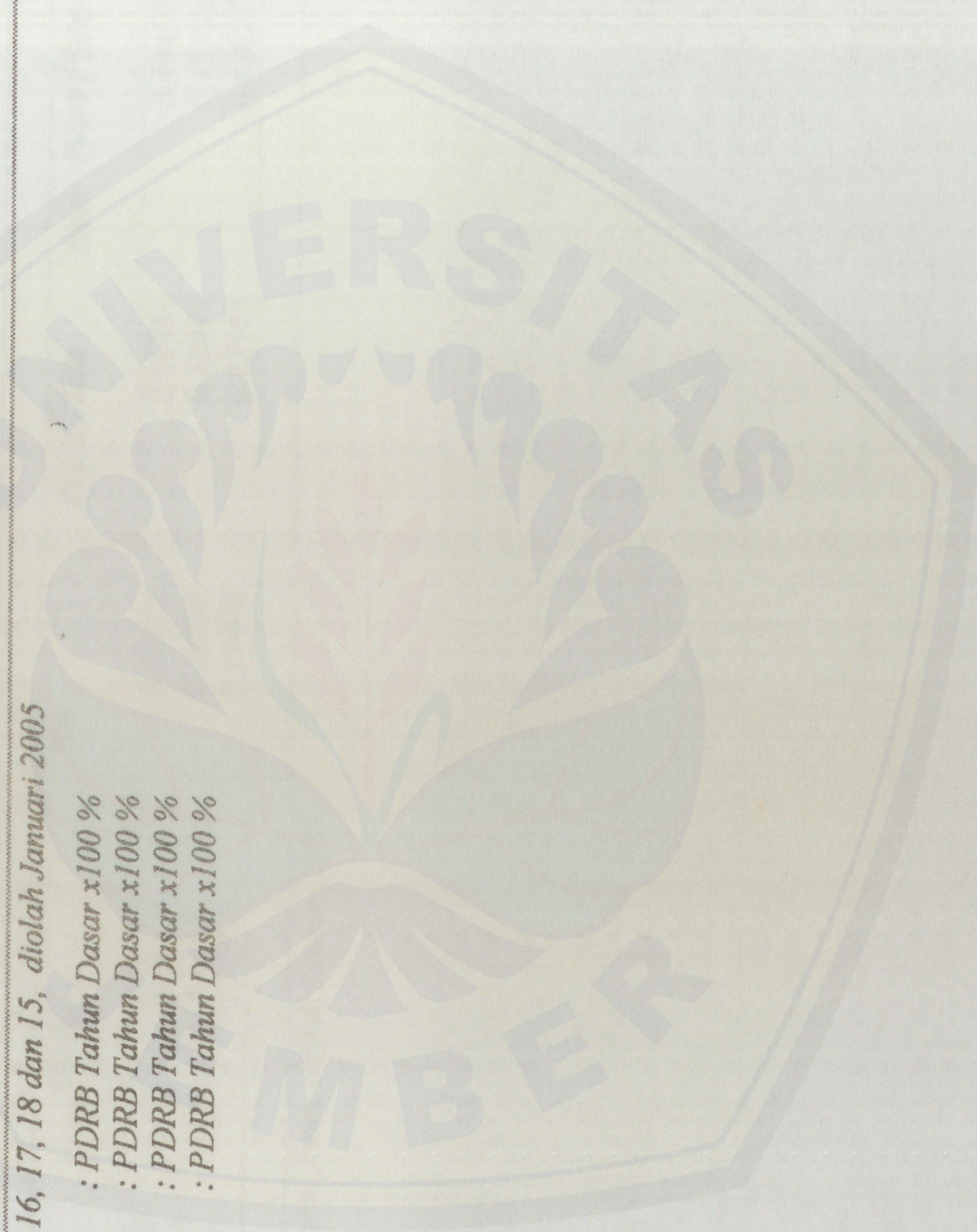
Sumber : lampiran 17 dan 18, diolah Januari 2005

Lampiran 20. Hasil Perhitungan PNij, PPIj, PPWij dan PTij Antar Wilayah di SWP IV Jember, 1997-2003

Wilayah	PNpj	PPsj	PPWtj	PTij
Jember	10.11821	4.75448	-0.21045	4.46983
Bondowoso	10.16400	0.14679	-6.88045	-14.68165
Situbondo	10.16400	0.10179	5.44333	5.44334

Sumber : lampiran 16, 17, 18 dan 15, diolah Januari 2005

- PNij : PDRB Tahun Dasar x100 %
- PPIj : PDRB Tahun Dasar x100 %
- PPWij : PDRB Tahun Dasar x100 %
- PTij : PDRB Tahun Dasar x100 %



Lampiran 21 : Hasil Perhitungan Indeks Williamson di SWP IV Jember Tahun 1997

Wilayah	Pendapatan	Jumlah Penduduk (fi)	n	Yi	Y
Jember	1.021.580	2.078.701	3.319.760	0.49145	1.04057
Bondowoso	921.480	661.412	3.319.760	1.39320	1.04057
Situbondo	1.517.074	579.647	3.319.760	2.61724	1.04057
Jumlah	3.040.134	3.319.760			

$(Y_i - Y)$	$(Y_i - Y)^2$	f_i/n	$(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Y
-0.54912	0.30153	0.62616	0.18881	0.43452	0.41758	
0.35263	0.12435	0.19923	0.12477	0.15738	0.15124	
1.12667	1.25938	0.17460	0.22163	0.47077	0.45251	

Sumber : BPS Pemprov Jatim, diolah Januari 2005

Lampiran 27 : Hasil Perhitungan Indeks Williamson di SWP IV Jember Tahun 2003

Wilayah	Pendapatan	Jumlah Penduduk (fi)	n	Yi	Y
Jember	1.023.440	2.131.289	3.454.224	0.48020	0.95118
Bondowoso	859.766	696.409	3.454.224	1.23521	0.95118
Situbondo	1.402.393	626.886	3.454.224	2.23708	0.95118
Jumlah	3.285.599	3.454.224			

$(Y_i - Y)$	$(Y_i - Y)^2$	f_i/n	$(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Y
-0.47098	0.22182	0.61701	0.13686	0.36994	0.38893	0.38893
0.28403	0.08067	0.20151	0.01625	0.12747	0.13402	0.13402
1.28950	1.65354	0.18148	0.30084	0.54849	0.57664	0.57664

Sumber : BPS Pemprov Jatim, diolah Januari 2005

Lampiran 26 : Hasil Perhitungan Indeks Williamson di SWP IV Jember Tahun 2002

Wilayah	Pendapatan	Jumlah Penduduk (fi)	n	Yi	Y
Jember	1.031.610	2.123.968	3.424.247	0.48570	0.94752
Bondowoso	832.747	689.923	3.424.247	1.20701	0.94752
Situbondo	1.380.173	610.356	3.424.247	2.26126	0.94752
Jumlah	3.244.530	3.424.247			

(Yi - Y)	(Yi - Y) ²	fi/n	(Yi - Y) ² fi/n	Akar (Yi - Y) ² fi/n	Akar (Yi - Y) ² fi/n	Y
-0.46182	0.21328	0.62027	0.13229	0.36372	0.38336	0.38336
0.25949	0.06733	0.20148	0.01356	0.11645	0.12270	0.12270
1.31374	1.72591	0.17824	0.30763	0.55464	0.58536	0.58536

Sumber : BPS Pemprov Jatim, diolah Januari 2005

Lampiran 25 : Hasil Perhitungan Indeks Williamson di SWP IV Jember Tahun 2001

Wilayah	Pendapatan	Jumlah Penduduk (fi)	n	Yi	Y
Jember	996.270	2.120.074	3.412.23	0.46992	0.93296
Bondowoso	831.742	688.344	3.412.23	1.20832	0.93296
Situbondo	1.355.370	603.705	3.412.23	2.24509	0.93296
Jumlah	3.183.382	3.412.23			

$(Y_i - Y)$	$(Y_i - Y)^2$	f_i/n	$(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Y
-0.46304	0.21441	0.62133	0.13322	0.36499	0.39122	0.39122
0.27536	0.07582	0.20173	0.01529	0.12365	0.13254	0.13254
1.31213	1.72168	0.17693	0.30462	0.51192	0.59158	0.59158

Sumber : BPS Pemprov Jatim, diolah Januari 2005

Lampiran 24 : Hasil Perhitungan Indeks Williamson di SWP IV Jember Tahun 2000

Wilayah	Pendapatan	Jumlah Penduduk (fi)	n	Yi	Y
Jember	966.270	2.114.103	3.389.030	0.45706	0.92445
Bondowoso	831.924	674.725	3.389.030	1.23298	0.92445
Situbondo	1.334.814	600.202	3.389.030	2.22394	0.92445
Jumlah	3.133.008	3.389.030			

$(Y_i - Y)$	$(Y_i - Y)^2$	f_i/n	$(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Y
-0.46739	0.21845	0.62381	0.13627	0.36915	0.39931	0.39931
0.30853	0.09519	0.19909	0.01895	0.13766	0.14891	0.14891
1.29949	1.68867	0.17710	0.29906	0.54686	0.59155	0.59155

Sumber : BPS Pemprov Jatim, diolah Januari 2005



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Lampiran 23 : Hasil Perhitungan Indeks Williamson di SWP IV Jember Tahun 1999

Wilayah	Pendapatan	Jumlah Penduduk (fi)	n	Yi	Y
Jember	938.500	2.106.632	3.335.223	0.44550	0.91773
Bondowoso	818.951	663.511	3.335.223	1.23427	0.91773
Situbondoc	1.138.075	581.080	3.335.223	2.26831	0.91773
Jumlah	3.075.562	3.335.223			

$(Y_i - Y)$	$(Y_i - Y)^2$	f_i/n	$(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Akar $(Y_i - Y)^2 f_i/n$	Y
-0.47223	0.22300	0.62861	0.14018	0.37441	0.40796	
0.32654	0.10020	0.19799	0.01983	0.14082	0.15344	
1.35058	1.82407	0.17339	0.31628	0.41640	0.45373	

Sumber : BPS Pemprov Jatim, diolah Januari 2005

Lampiran 22 : Hasil Perhitungan Indeks Williamson di SWP IV Jember Tahun 1998

Wilayah	Pendapatan	Jumlah Penduduk (fi)	n	Yi	Y
Jember	927.290	2.083.068	3.325.226	0.46676	0.91937
Bondowoso	815.018	661.915	3.325.226	1.23130	0.91937
Situbondo	1.314	580.243	3.325.226	2.26597	0.91937
Jumlah	3.057.121	3.325.226			

(Yi - Y)	(Yi - Y) ²	fi/n	(Yi - Y) ² fi/n	Akar (Yi - Y) ² fi/n	Akar (Yi - Y) ² fi/n	Y
-0.45261	0.20485	0.62644	0.12833	0.35823	0.38965	0.91937
0.31193	0.09730	0.19906	0.01937	0.13918	0.15138	0.91937
1.34660	1.81333	0.17499	0.31642	0.56251	0.61184	0.91937

Sumber : BPS Pemprov Jatim, diolah Januari 2005